



**RANCANGAN AWAL RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. GUNA BARU TRANS RANGKANG  
KANTOR BUPATI SATU ATAP KABUPATEN BENGKAYANG  
TELP.(0562) 441807& 441612



## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami mempersembahkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk periode 2025-2029 sebagai arah tujuan, sasaran, strategis, program dan kegiatan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Dokumen perencanaan strategis ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) ini mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang untuk periode 2025-2029 dan diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk periode 2025-2029, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang di masa yang akan datang pada khususnya.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah untuk periode 2025-2029 ini, besar harapan kami dapat menunjang pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bengkayang untuk periode 2025-2029.

Bengkayang, 23 Mei 2025

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bengkayang

**YUSTIANUS, S.E., M.M**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19691116 200003 1 004



## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR i**  
**DAFTAR ISI ii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Dasar Hukum 4
- 1.3 Maksud dan Tujuan 11
- 1.4 Sistematika Penulisan 12

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH 13**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 13
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah 26
- 2.3 Sumber Daya Keuangan 30
- 2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah 30
- 2.5 Kelompok Sasaran Layanan 45
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah 46
- 2.7 Identifikasi Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis 50
- 2.8 Rumusan Isu Strategis Daerah 53
- 2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah 60

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 62**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah 62
- 3.2 Strategi Sekretariat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran 69
- 3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah 72

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 80**

- 4.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 80
- 4.2 Program Perekonomian dan Pembangunan 81
- 4.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 81
- 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah 93
- 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 94
- 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 99

**BAB V PENUTUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, dan transparan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai motor penggerak koordinasi, fasilitasi, serta administrasi pemerintahan, yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 didasari oleh kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terukur, terarah, dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*outcome*).

Secara khusus, Misi ke-2 RPJMD, yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel*”, menjadi acuan utama dalam perumusan strategi Sekretariat Daerah. Misi ini diterjemahkan dalam tujuan strategis “*Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas*”, yang menekankan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi, transparansi pelayanan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang memastikan setiap bagian dan sub bagian di lingkungan Sekretariat Daerah berperan aktif dalam menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian integral dari implementasi reformasi birokrasi yang menuntut adanya perencanaan yang adaptif terhadap tantangan eksternal, seperti dinamika sosial-politik, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.



Dokumen ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yang menjadi rujukan penting dalam penyusunan Renstra berbasis kinerja dan terintegrasi dengan penganggaran. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga merupakan dokumen pertanggungjawaban publik terhadap alokasi anggaran dan capaian kinerja pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Meningkatnya kompleksitas urusan pemerintahan daerah, yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem manajemen kinerja yang akuntabel.
- b. Tuntutan digitalisasi layanan administrasi dan transformasi teknologi informasi, yang mendorong perubahan paradigma kerja birokrasi agar menjadi lebih adaptif, cepat, dan transparan.
- c. Pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pelayanan publik yang responsif.

Penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Daerah. Proses ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2021–2024), termasuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berbagai tantangan yang belum terselesaikan secara optimal. Refleksi atas capaian masa lalu menjadi bekal penting agar Renstra 2025–2029 lebih responsif terhadap tantangan dan peluang strategis di masa depan.

Arah kebijakan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun mendatang akan difokuskan pada beberapa prioritas utama, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, berintegritas, dan kolaboratif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip *good governance* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



2. Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan sosial berbasis data dan teknologi.
3. Memperkuat kualitas produk hukum daerah dan layanan bantuan hukum untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas kebijakan.
4. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing daerah.
5. Menyusun program kerja berbasis elektronik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan optimalisasi sistem *e-procurement*.
7. Memperkuat manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi ASN berbasis digital.
8. Mendorong efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan, memperkuat budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan publik.
9. Meningkatkan profesionalisme dalam layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, mendukung koordinasi yang efektif.
10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penataan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Melalui Renstra ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sangat bergantung pada sinergi lintas perangkat daerah yang dikomandoi oleh peran koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan dalam Renstra ini harus berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang terukur dan akuntabel.

Dengan latar belakang tersebut, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan kokoh bagi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program prioritas, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) diselaraskan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta RPJMD, dengan sifat indikatif. Renstra PD menjawab tiga pertanyaan dasar:



- Arah pengembangan pelayanan perangkat daerah dan capaian yang ditargetkan dalam lima tahun;
- Strategi pencapaian tujuan tersebut;
- Langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai target.

Sebagai konsekuensi logis dari peran strategis ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang berlandaskan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tinggi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sangat penting dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah di era globalisasi. Pada akhirnya, kinerja pelayanan publik yang baik akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang ke depan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 205-2030 disusun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);



31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
33. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
36. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta pedoman lampirannya;
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Porganuembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  49. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 6; Noreg. 6-227/2024);



51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 8-328/2024);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;
53. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045;
55. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan terarah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai koordinator administratif pemerintahan dengan arah



kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

### **1.3.2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas program/kegiatan Sekretariat Daerah secara terstruktur dan logis dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah;
2. Memberikan kerangka strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unit koordinatif, administratif, dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja;
4. Menjamin kesinambungan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pelayanan administratif, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, hukum, organisasi, serta hubungan antar lembaga;
5. Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja organisasi, baik internal maupun eksternal, secara periodik;
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Sumber Daya Keuangan
- 2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.5 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah
- 2.7 Identifikasi Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis
- 2.8 Rumusan Isu Strategis Daerah
- 2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah
- 3.2 Strategi Sekretariat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 4.2 Program Perekonomian dan Pembangunan
- 4.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah
- 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

### **BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah memiliki fungsi strategis sebagai penggerak utama dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan, baik dari sisi perumusan kebijakan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan secara menyeluruh.

Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah bersifat internal (dalam lingkungan pemerintah daerah) dan eksternal (kepada masyarakat melalui fasilitasi kebijakan dan komunikasi publik). Fungsi pelayanan Sekretariat Daerah mencakup:

1. Pelayanan Koordinatif, yaitu kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka menyinkronkan kebijakan dan program pembangunan daerah. Koordinasi ini mencakup aspek pemerintahan umum, pembangunan, dan kemasyarakatan;
2. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan dalam bentuk penyusunan, pengelolaan, dan penyampaian dokumen administrasi pemerintahan, seperti pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan, protokol, serta tata usaha pimpinan;
3. Pelayanan Fasilitasi, yaitu bantuan teknis kepada perangkat daerah, kepala daerah, maupun lembaga legislatif daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk fasilitasi hubungan kemitraan antar lembaga;
4. Pelayanan Dukungan Operasional, seperti penyediaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan rumah tangga kepala daerah, pengamanan aset, pengelolaan



kepegawaian, serta dukungan teknis terhadap kegiatan kedinasan kepala daerah dan perangkat daerah lainnya;

5. Pelayanan Informasi dan Komunikasi Pemerintahan, yang berkaitan dengan diseminasi informasi kebijakan daerah, penyampaian laporan kinerja, serta penguatan citra pemerintah daerah kepada publik.

Secara struktur organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari tiga Asisten yang membawahi beberapa Bagian dan Sub Bagian. Masing-masing unit kerja ini memiliki tanggung jawab yang saling terkait dalam memberikan pelayanan yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pelayanan Sekretariat Daerah tidak bersifat langsung kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan perizinan atau pelayanan publik lainnya, namun berperan besar dalam memastikan bahwa seluruh sistem pemerintahan daerah berjalan dengan tertib, lancar, dan profesional. Oleh karena itu, keberhasilan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah berdampak langsung terhadap kinerja seluruh perangkat daerah dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Dalam konteks Rencana Strategis ini, pelayanan Sekretariat Daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Transformasi pelayanan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

## **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang**

### **1) Tugas Sekretariat Daerah**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah*, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki tugas pokok.



***“Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.”***

Tugas ini mencerminkan peran sentral Sekretariat Daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah, baik secara internal melalui fasilitasi kerja perangkat daerah maupun eksternal melalui hubungan koordinatif dengan mitra strategis pemerintah.

**2) Fungsi Sekretariat Daerah**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, baik yang bersifat lintas sektoral maupun sektoral;
3. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, meliputi urusan tata usaha, organisasi dan tatalaksana, hukum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan hubungan masyarakat;
4. Pengelolaan sumber daya aparatur dan aset untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah dan kepala daerah;
5. Fasilitasi hubungan kerja dan koordinasi kepala daerah dengan DPRD, instansi vertikal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Fungsi-fungsi ini dijalankan dalam kerangka memperkuat pelayanan administratif yang andal, serta memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan tertib, efisien, dan sinergis.

**3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari tiga unsur pimpinan utama yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum, yang masing-masing membawahi beberapa Bagian, dan di dalamnya terdapat Sub Bagian, sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

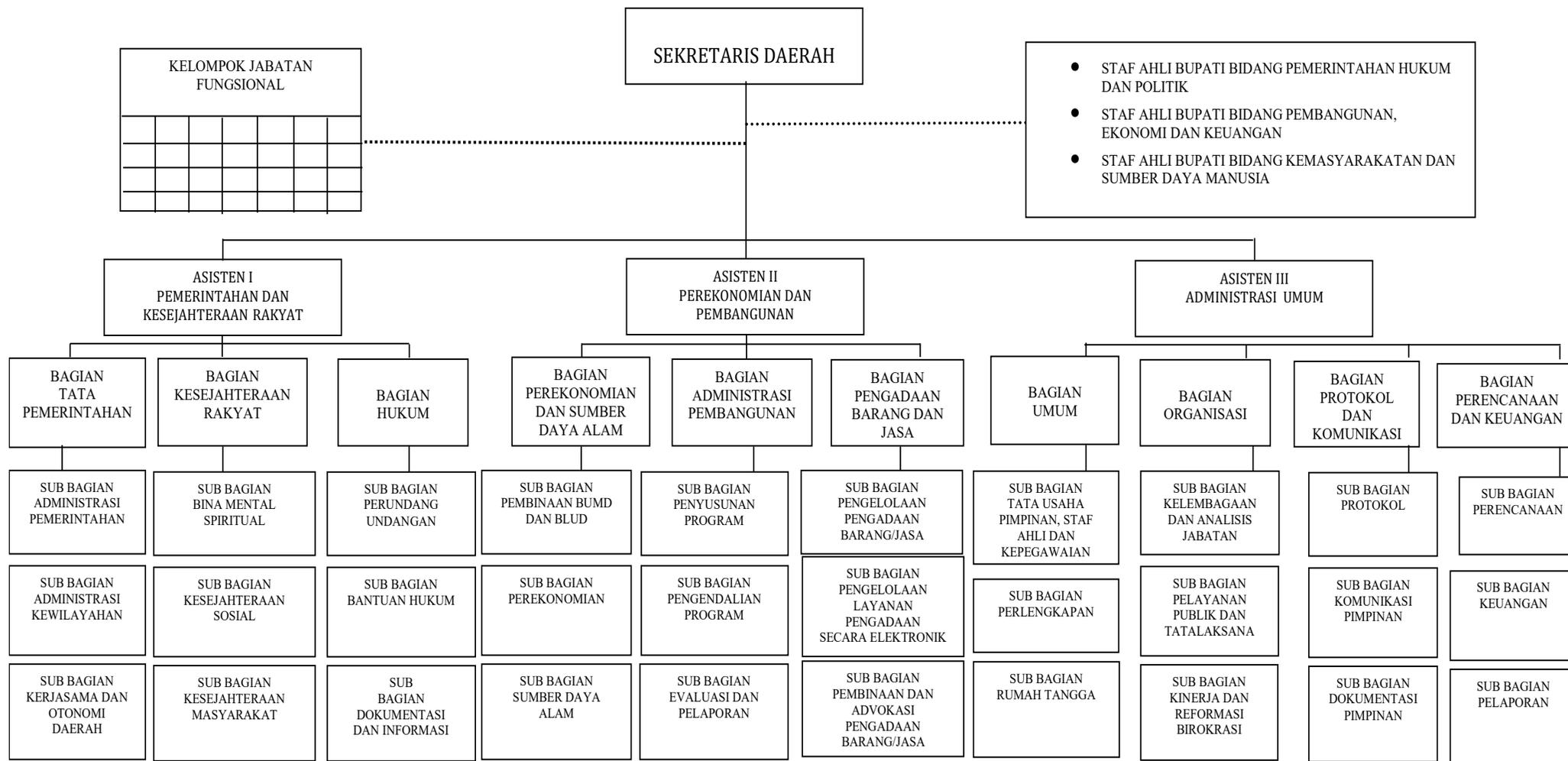


- Bagian Tata Pemerintahan
  - Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - Bagian Hukum
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
- Bagian Perekonomian
  - Bagian Administrasi Pembangunan
  - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi;
- Bagian Organisasi
  - Bagian Umum
  - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Setiap Bagian membawahi beberapa Sub Bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi teknis administratif dan koordinatif sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur ini dirancang untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, dengan pembagian kerja yang jelas, terukur, dan saling terintegrasi. Struktur organisasi tersebut juga mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi modern yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kinerja.



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**





## **1. Sekretaris Daerah**

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Secara lebih rinci, tugas Sekretaris Daerah adalah:

- a. Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- e. Mengelola komunikasi dan koordinasi strategis dengan instansi vertikal, legislatif, dan lembaga non-pemerintah;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara teknis dan administratif;

## **2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik**

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Pemerintahan, Hukum dan HAM;
- b. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang membidangi masalah Politik;
- d. Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



### **3. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan**

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati mengenai Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- b. penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- c. pelaksanaan mewakili pemerintah daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia**

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas Pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



## **5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, hukum dan kerjasama, Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

### **a. Bagian Tata Pemerintahan**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;



- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

**b. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.



### **c. Bagian Hukum.**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

### **6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)**

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam dan administrasi pembangunan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;



- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

**a. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

**b. Bagian Administrasi Pembangunan**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

**c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.



## **7. Asisten Administrasi Umum (Asisten III)**

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari:

### **a. Bagian Umum**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.



### **b. Bagian Organisasi**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

### **c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;



- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

**d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

Mempunyai tugas pokok membantu Asisten III Bidang Administrasi Umum melaksanakan penyiapan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

## **2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH**

### **2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan data kepegawaian terbaru, jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah sebanyak **260 orang**, yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional, dan tenaga harian lepas (THL).

Komposisi jabatan struktural diduduki oleh **17 orang** yang tersebar di seluruh bagian, dengan dominasi latar belakang pendidikan sarjana (S1). Jabatan fungsional



mencapai **85 orang**, yang menunjukkan arah kebijakan penguatan fungsionalisasi aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis. Sementara itu, jumlah THL mencapai **100 orang**, yang menempati posisi terbesar terutama di **Bagian Umum**, mencerminkan ketergantungan tinggi pada tenaga non-ASN untuk pekerjaan administratif dan teknis dasar.

Tingkat Pendidikan sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan **Sarjana (S1)** sebanyak **39 orang**, dan **Magister (S2)** sebanyak **5 orang**, seluruhnya menempati jabatan Eselon II. Sementara itu, terdapat **61 orang** lulusan Diploma 3 (D3) dan **61 orang** lulusan SMA, yang sebagian besar merupakan tenaga harian lepas.

Data Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang**

JABATAN	MAGISTER (S2)	SARJANA (S1)	DIPLOMA (D3)	DIPLOMA (D2)	DIPLOMA (D1)	SMA	SMP	SD	TOTAL	L	P	TOTAL
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
<b>Eselon II</b>	5								5			
<b>BAGIAN UMUM</b>												
STRUKTURAL	1	1							2			
FUNGSIONAL	1	7	1			8			17			
TENAGA HARIAN LEPAS		5	9		1	41		1	57			
<b>BAGIAN ORGANISASI</b>												
STRUKTURAL	1								1			
FUNGSIONAL		6				1			7			
TENAGA HARIAN LEPAS		2	3			1			6			
<b>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>												
STRUKTURAL	1	1							2			
FUNGSIONAL		2	2						4			
TENAGA HARIAN LEPAS		3	4			3			10			
<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>												
STRUKTURAL		1							1			
FUNGSIONAL	1	4							5			
TENAGA HARIAN LEPAS		2	4			3			9			
<b>BAGIAN EKBANG</b>												
STRUKTURAL	1								1			
FUNGSIONAL		4							4			
TENAGA HARIAN LEPAS		2	3			2			7			



BAGIAN PBJ												
STRUKTURAL	1	3							4			
FUNGSIONAL		10	1			2			13			
TENAGA HARIAN LEPAS		1	5			3			9			
BAGIAN PEMERINTAHAN												
STRUKTURAL	1								1			
FUNGSIONAL	2	3				1			6			
TENAGA HARIAN LEPAS		2	3			3			8			
BAGIAN HUKUM												
STRUKTURAL	1								1			
FUNGSIONAL	1	5							6			
TENAGA HARIAN LEPAS		2	3			3			8			
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
STRUKTURAL	1								1			
FUNGSIONAL		3							3			
TENAGA HARIAN LEPAS		2	4			4			10			
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
STRUKTURAL	1	1							2			
FUNGSIONAL		4	2			2			8			
TENAGA HARIAN LEPAS		2	5			2			9			

## 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana adalah komponen penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas, baik dalam konteks pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat umum. Sarana merujuk pada alat atau fasilitas langsung yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas, sedangkan prasarana mengacu pada infrastruktur dasar yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Berikut adalah alasan mengapa sarana dan prasarana memiliki peran penting.

Sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas, tetapi merupakan elemen strategis yang memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kemajuan suatu komunitas atau organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas bagi individu, organisasi, maupun pemerintah.

Untuk menunjang Sarana dan Prasarana Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, maka diperlukan fasilitas yang cukup memadai, agar setiap kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini beberapa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah:



- a. Aset Tanah yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 637 persil;
- b. Aset Peralatan dan Mesin yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 3.260 Unit;
- c. Aset Gedung dan Bangunan yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 133 buah;
- d. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 128 buah;
- e. Aset Tetap lainnya yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 82 buah.

Aset lainnya yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 343 buah. Gambaran secara lengkap tentang kondisi Sarana dan Prasarana per- Pebruari 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah seperti pada tabel berikut ini:

Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2  
Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah  
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah Tahun 2025  
Kabupaten Bengkulu Tengah**

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH	637	57.921.155.168,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	3.260	59.989.944.613,63	
		01	- Alat Besar	12	869.012.421,00	
		02	- Alat Angkut	122	23.502.490.227,00	
		03	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	99	1.604.403.121,95	
		04	- Alat Pertanian	20	129.375.865,00	
		05	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.361	24.393.596.965,68	
		06	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	188	2.931.677.944,00	
		07	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	15.505.750,00	
		08	- Alat Laboratorium	100	1.712.884.240,00	
		09	- Alat Persenjataan	1	2.450.000,00	
		10	- Komputer	347	4.754.296.591,00	
		11	- Alat Eksplorasi		0,00	
		12	- Alat Pengeboran		0,00	
		13	- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		0,00	
		14	- Alat Bantu Eksplorasi		0,00	
		15	- Alat Keselamatan Kerja	6	42.651.488,00	
		16	- Alat Peraga		0,00	
		17	- Peralatan Proses / Produksi		0,00	
		18	- Rambu-rambu		0,00	
		19	- Peralatan Olahraga	3	31.600.000,00	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

3	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>133</b>	<b>115.519.401.347,00</b>
		01	- Bangunan Gedung	117	112.822.964.588,00
		02	- Monumen	5	859.003.201,00
		03	- Bangunan Menara		0,00
		04	- Tugu titik Kontrol / Pasti	11	1.837.433.558,00
4	04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>128</b>	<b>60.392.223.136,00</b>
		01	- Jalan dan Jembatan	25	32.369.931.225,00
		02	- Bangunan Air/Irigasi	10	1.828.948.876,00
		03	- Instalasi	15	3.433.120.287,00
		04	- Jaringan	78	22.760.222.748,00
5	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>82</b>	<b>296.575.310,00</b>
		01	- Bahan Perpustakaan	36	171.700.000,00
		02	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahra	46	124.875.310,00
		03	- Hewan		0,00
		04	- Biota Perairan		0,00
		05	- Tanaman		0,00
		06	- Barang Koleksi Non Budaya		0,00
		07	- Aset Tetap Dalam Renovasi		0,00
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>0,00</b>
			JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	4.240	294.119.299.574,63
			Akumulasi Penyusutan		(123.594.596.727,92)
			JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	4.240	170.524.702.846,71
7	07		<b>ASET LAINNYA</b>	<b>115</b>	<b>1.551.995.480,00</b>
		03	- Aset Tak Berwujud	1	209.745.000,00
		04	- Aset Lain-lain	114	2.883.782.694,88
			Amortisasi		(209.745.000,00)
			Penyusutan aset lain-lain		(1.331.787.214,88)
			TOTAL	4.355	172.076.698.326,71

### 2.3. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan adalah seluruh bentuk dana atau anggaran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, sumber daya keuangan meliputi pendapatan daerah (seperti dana transfer dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah, dan lain-lain), serta belanja daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber daya keuangan memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas pencapaian sasaran strategis, karena menjadi dasar pembiayaan atas seluruh kegiatan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan administrasi pemerintahan yang efisien dan akuntabel.



#### **2.4. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, ketepatan, kualitas, dan kepuasan pengguna layanan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren kinerja yang cukup baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang sebagian besar mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 87,88%, meningkat signifikan menjadi 134,90% pada tahun 2023, dan tetap tinggi dengan capaian 85,23% pada tahun 2024, meskipun terdapat beberapa data yang belum dirilis. Kinerja ini mencerminkan upaya konsisten Sekretariat Daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan dukungan teknis administratif kepada kepala daerah serta seluruh perangkat daerah.

Pada Sasaran Strategis 1, yaitu peningkatan kualitas dan sinergi tata kelola pemerintahan, sebagian besar indikator menunjukkan hasil maksimal, seperti Nilai Pelayanan Publik, Nilai SAKIP, dan Tingkat Kepuasan Masyarakat, yang konsisten mencapai 100% setiap tahun. Namun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian fluktuatif dan pada tahun 2024 belum dirilis nilainya, menandakan perlunya peningkatan berkelanjutan dalam aspek reformasi struktural birokrasi.

Sementara itu, untuk Sasaran Strategis yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan masyarakat, seluruh indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rata-rata capaian 100%, bahkan Indikator Persentase Regulasi dan Indikator Pembinaan Keagamaan menunjukkan hasil optimal selama tiga tahun berturut-turut.

Pada Sasaran Strategis 3, yakni peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kemitraan dengan dunia usaha, capaian menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Kerjasama daerah dengan dunia usaha mencapai lebih dari 100% capaian target,



termasuk indikator pelaksanaan CSR dan realisasi fisik anggaran OPD, yang bahkan melampaui target hingga lebih dari 400% pada tahun 2023.

Secara umum, capaian indikator yang menunjukkan tren positif mengindikasikan keberhasilan dalam tata kelola, pelayanan administratif, penguatan koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meski begitu, perhatian khusus perlu diberikan terhadap indikator yang belum tersedia datanya (seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai LPPD pada tahun 2024) sebagai bahan evaluasi dan penguatan sistem pelaporan ke depan.

Ke depan, Sekretariat Daerah akan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik melalui reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, maupun penguatan kemitraan lintas sektor demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah table capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 sampai 2024:

Tabel. 2.3  
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya kualitas dan sinergi tas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC	66,67%	B (60)	B (55,59)	92,65%	CC	Nilai belum keluar	0%
		Predikat/Indeks SPBE	C	C	100%	C (2,40)	C (2,46)	102,50%	-	-	0%
		Nilai Pelayanan Publik	0	0	0%	C (70)	C (70,49)	100,70%	B	B	100%
		Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang	B	B	100%	B (60)	B (60,90)	101,50%	B	B	100%
		Nilai Tingkat Disiplin ASN	Sedang	Sedang	100%	Sedang (80,50%)	Tinggi (91,31%)	113,43%	Sedang	Sedang	100%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat	B	B	100%	B (80)	B (81,80)	102,25%	B	B	100%
		Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	0	0	0%	100%	101,63%	101,63%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan	0	0	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Tinggi	Tinggi	100%	Sedang (2)	Sedang (2,6460)	132,30%	Sedang	Nilai belum keluar	0%
		Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	100%	100%	100%	100%	107,74%	107,74%	100%	111%	111%



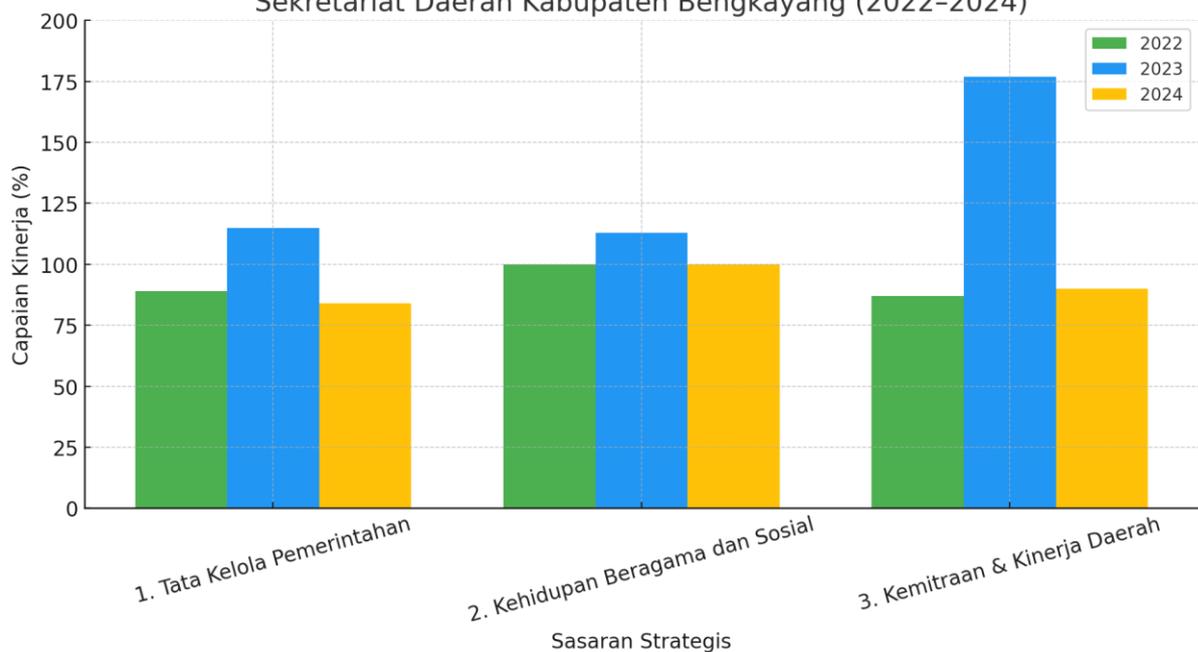
**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

		Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	0	0	0%	100%	100,00%	100%	0%	0%	0%	
		Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	Sedang	Sedang	100%	Tinggi (100%)	Tinggi (100%)	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	100%	100%	100%	Tinggi (100%)	Tinggi (141,38%)	141,38%	100%	100%	100%	
		Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	4%	n/a	0%	4,00%	19,54%	488,50%	0%	0%	0%	
		Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
		Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	109,90%	109,90%	0%	0%	0%	
		Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	100%	96,48%	100%	100%	129%	129%	100%	97%	97%	
			Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)		87,88%	Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		134,90%	Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)		85,23%	

Sumber: Data olahan 2022,2023 dan 2024.

**Gambar 2.1**

Rata-Rata Capaian Kinerja per Sasaran Strategis  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (2022-2024)



Grafik di atas menampilkan Rata-Rata Capaian Kinerja per Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun 2022 hingga 2024:



1. Tata Kelola Pemerintahan menunjukkan konsistensi capaian yang tinggi, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024;
2. Kehidupan Beragama dan Sosial stabil dengan capaian selalu mencapai atau mendekati 100%;
3. Kemitraan dan Kinerja Daerah mencatat lonjakan luar biasa pada tahun 2023, didorong oleh keberhasilan pelaksanaan program CSR dan realisasi kegiatan fisik sesuai triwulan.



**Tabel 2.4  
Anggaran, Realisasi dan Pendanaan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah  
Periode Tahun 2022-2024**

PROGRAM/KEGIA TAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...						JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>Sekretariat Daerah</b>				115.713.5 80.411		41.264.5 79.399		41.535.3 86.527		32.913.6 14.485	115.713.5 80.411		37.093.3 86.373		39.538.9 61.212		28.115.1 35.950	104.747.4 83.535		89,89 %		95,19 %		85,4 2%	90,5 2%	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	<b>Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>91.333.50 1.721</b>	<b>100 %</b>	<b>33.214.4 62.329</b>	<b>100 %</b>	<b>31.943.0 66.377</b>	<b>100 %</b>	<b>26.175.9 73.015</b>	<b>91.333.50 1.721</b>	<b>100 %</b>	<b>29.146.3 00.339</b>	<b>100 %</b>	<b>30.272.2 84.864</b>	<b>100%</b>	<b>25.186.1 73.679</b>	<b>84.604.75 8.882</b>	<b>100%</b>	<b>87,75 %</b>	<b>100%</b>	<b>94,77 %</b>	<b>100%</b>	<b>96,2 2%</b>	<b>92,6 3%</b>	
<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>267.799.6 60</b>	<b>1</b>	<b>50.394.0 00</b>	<b>1</b>	<b>125.000. 000</b>	<b>1</b>	<b>92.405.6 60</b>	<b>267.799.6 60</b>	<b>1</b>	<b>48.981.3 00</b>	<b>1</b>	<b>116.317. 195</b>	<b>1</b>	<b>82.492.0 50</b>	<b>247.790.5 45</b>	<b>100%</b>	<b>97,20 %</b>	<b>100%</b>	<b>93,05 %</b>	<b>100%</b>	<b>89,2 7%</b>	<b>92,5 3%</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	57	90.397.50 0	19	7.500.00 0	19	39.995.00 00	19	42.902.50 00	90.397.50 0	19	7.393.00 0	19	39.180.25 50	19	39.521.80 00	86.095.05 0	100%	98,57 %	100%	97,96 %	100%	92,1 2%	95,2 4%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3	24.980.00 0	1	7.500.00 0	1	15.000.00 00	1	2.480.00 0	24.980.00 0	1	7.291.00 0	1	9.333.60 0	1	1.658.00 0	18.282.60 0	100%	97,21 %	100%	62,22 %	100%	66,8 5%	73,1 9%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	6	27.645.00 0	2	7.500.00 0	2	15.000.00 00	2	5.145.00 0	27.645.00 0	2	7.084.30 0	2	14.805.60 00	2	2.554.50 0	24.444.40 0	100%	94,46 %	100%	98,70 %	100%	49,6 5%	88,4 2%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	3	23.263.00 0	1	5.932.00 0	1	5.005.00 0	1	12.326.00 00	23.263.00 0	1	5.932.00 0	1	4.813.32 0	1	11.556.20 00	22.301.52 0	100%	100,00 %	100%	96,17 %	100%	93,7 5%	95,8 7%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...								JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
			TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6	28.503.160	2	6.962.000	2	15.000.000	2	6.541.160	28.503.160	2	6.962.000	2	14.700.425	2	5.929.050	27.591.475	100%	100,00%	100%	98,00%	100%	90,64%	96,80%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12	31.171.000	4	7.500.000	4	15.000.000	4	8.671.000	31.171.000	4	7.273.000	4	14.495.900	4	7.833.200	29.602.100	100%	96,97%	100%	96,64%	100%	90,34%	94,97%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	15	41.840.000	5	7.500.000	5	20.000.000	5	14.340.000	41.840.000	5	7.046.000	5	18.988.100	5	13.439.300	39.473.400	100%	93,95%	100%	94,94%	100%	93,72%	94,34%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan Capaian kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3	33.128.409.229	1	10.488.602.787	1	11.470.900.901	1	11.168.905.541	33.128.409.229	1	9.924.586.808	1	11.176.542.119	1	10.755.352.141	31.856.481.068	100%	94,62%	100%	97,43%	100%	96,30%	96,16%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1652 Orang/bulan	4956	32.971.157.729	1652	10.453.050.787	1652	11.395.900.901	1652	11.122.206.041	32.971.157.729	1652	9.889.212.408	1652	11.118.421.919	1652	10.715.666.691	31.723.301.018	100%	94,61%	100%	97,57%	100%	96,34%	96,22%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	600	34.338.000	200	7.500.000	200	15.000.000	200	11.838.000	34.338.000	200	7.363.000	200	14.598.450	200	10.524.800	32.486.250	100%	98,17%	100%	97,32%	100%	88,91%	94,61%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	6	32.803.000	2	7.500.000	2	15.000.000	2	10.303.000	32.803.000	2	7.489.000	2	13.689.950	2	8.217.050	29.396.000	100%	99,85%	100%	91,27%	100%	79,75%	89,61%	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	60	30.824.000	20	6.582.000	20	15.000.000	20	9.242.000	30.824.000	20	6.580.200	20	8.346.500	20	7.923.000	22.849.700	100%	99,97%	100%	55,64%	100%	85,73%	74,13%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...						JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	20 Dokumen	60	26.795.000	20	7.500.000	20	15.000.000	20	4.295.000	26.795.000	20	7.477.000	20	13.126.800	20	3.305.500	23.909.300	100%	99,69%	100%	87,51%	100%	76,96%	89,23%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	15	32.491.500	5	6.470.000	5	15.000.000	5	11.021.500	32.491.500	5	6.465.200	5	8.358.500	5	9.715.100	24.538.800	100%	99,93%	100%	55,72%	100%	88,15%	75,52%	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>1.199.190.250</b>	<b>1</b>	<b>517.531.600</b>	<b>1</b>	<b>537.307.150</b>	<b>1</b>	<b>144.351.500</b>	<b>1.199.190.250</b>	<b>1</b>	<b>362.259.200</b>	<b>1</b>	<b>474.344.951</b>	<b>1</b>	<b>137.016.570</b>	<b>973.620.721</b>	<b>100%</b>	<b>70,00%</b>	<b>100%</b>	<b>88,28%</b>	<b>100%</b>	<b>94,92%</b>	<b>81,19%</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6	37.121.000	2	7.500.000	2	15.000.000	2	14.621.000	37.121.000	2	7.500.000	2	11.130.150	2	13.894.500	32.524.650	100%	100,00%	100%	74,20%	100%	95,03%	87,62%	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	20 Dokumen	60	370.279.850	20	191.972.700	20	178.307.150	20	-	370.279.850	20	159.836.750	20	178.105.600	20	-	337.942.350	100%	83,26%	100%	99,89%	100%	0,00%	91,27%	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	9	82.594.000	3	65.945.000	3	15.000.000	3	1.649.000	82.594.000	3	-	3	3.132.500	3	1.248.000	4.380.500	100%	0,00%	100%	20,88%	100%	75,68%	5,30%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	15	28.090.500	5	7.500.000	5	15.000.000	5	5.590.500	28.090.500	5	7.500.000	5	8.523.250	5	5.319.400	21.342.650	100%	100,00%	100%	56,82%	100%	95,15%	75,98%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	15	681.104.900	5	244.613.900	5	314.000.000	5	122.491.000	681.104.900	5	187.422.450	5	273.453.451	5	116.554.670	577.430.571	100%	76,62%	100%	87,09%	100%	95,15%	84,78%	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>337.989.000</b>	<b>1</b>	<b>178.661.000</b>	<b>1</b>	<b>135.780.000</b>	<b>1</b>	<b>23.548.000</b>	<b>337.989.000</b>	<b>1</b>	<b>152.276.568</b>	<b>1</b>	<b>105.740.923</b>	<b>1</b>	<b>19.750.011</b>	<b>277.767.502</b>	<b>100%</b>	<b>85,23%</b>	<b>100%</b>	<b>77,88%</b>	<b>100%</b>	<b>83,87%</b>	<b>82,18%</b>	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	114 orang	342	44.810.000	114	7.500.000	114	37.310.000	114	-	44.810.000	114	6.986.000	114	9.232.000	114	-	16.218.000	100%	93,15%	100%	24,74%	100%	0,00%	36,19%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	114 orang	342	30.580.000	114	7.500.000	114	20.520.000	114	2.560.000	30.580.000	114	7.140.000	114	19.395.653	114	-	26.535.653	100%	95,20%	100%	94,52%	100%	0,00%	86,77%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...								JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
			TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	75	262.599.000	25	163.661.000	25	77.950.000	25	20.988.000	262.599.000	25	138.150.568	25	77.113.270	25	19.750.11	235.013.849	100%	84,41 %	100%	98,93 %	100%	94,10 %	89,50 %	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>13.970.146.316</b>	<b>1</b>	<b>5.503.816.800</b>	<b>1</b>	<b>5.010.681.166</b>	<b>1</b>	<b>3.455.648.350</b>	<b>13.970.146.316</b>	<b>1</b>	<b>4.102.832.558</b>	<b>1</b>	<b>4.446.121.824</b>	<b>1</b>	<b>3.359.112.979</b>	<b>11.908.067.361</b>	<b>100%</b>	<b>74,55 %</b>	<b>100%</b>	<b>88,73 %</b>	<b>100%</b>	<b>97,21 %</b>	<b>85,24 %</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	150	795.983.566	50	405.449.000	50	247.606.566	50	142.928.000	795.983.566	50	144.509.000	50	151.546.651	50	135.265.000	431.320.651	100%	35,64 %	100%	61,20 %	100%	94,64 %	54,19 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Jenis ATK	210	1.063.091.050	70	376.670.000	70	503.080.000	70	183.341.050	1.063.091.050	70	376.590.400	70	459.522.300	70	169.335.000	1.005.447.700	100%	99,98 %	100%	91,34 %	100%	92,36 %	94,58 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Bangunan Kantor	1 TAHUN	3	1.715.602.000	1	904.484.800	1	726.628.000	1	84.489.200	1.715.602.000	1	888.310.000	1	679.455.000	1	80.049.000	1.647.814.000	100%	98,21 %	100%	93,51 %	100%	94,74 %	96,05 %	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	1 Paket	3	2.150.536.500	1	1.019.829.000	1	806.335.000	1	324.372.500	2.150.536.500	1	580.441.500	1	642.866.000	1	315.895.400	1.539.202.900	100%	56,92 %	100%	79,73 %	100%	97,39 %	71,57 %	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	462500 Lembar	1387500	196.242.000	462500	64.625.000	462500	59.501.000	462500	72.116.000	196.242.000	462500	64.561.500	462500	59.432.000	462500	72.109.000	196.103.000	100%	99,90 %	100%	99,88 %	100%	99,99 %	99,93 %	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1500 Majalah/Surat Kabar	4500	66.339.100	1500	27.999.000	1500	28.560.100	1500	9.780.000	66.339.100	1500	27.360.000	1500	23.360.000	1500	7.506.000	58.226.000	100%	97,72 %	100%	81,79 %	100%	76,75 %	87,77 %	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3	95.252.600	1	30.000.000	1	25.400.000	1	39.852.600	95.252.600	1	29.001.000	1	25.280.000	1	-	54.281.000	100%	96,67 %	100%	99,53 %	100%	0,00 %	56,99 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	36	2.113.282.500	12	1.050.000	12	550.972.500	12	512.310.000	2.113.282.500	12	477.035.500	12	439.716.000	12	502.696.900	1.419.448.400	100%	45,43 %	100%	79,81 %	100%	98,12 %	67,17 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	150 Kegiatan	450	5.579.122.000	150	1.562.385.000	150	1.985.278.000	150	2.031.459.000	5.579.122.000	150	1.477.370.658	150	1.889.432.423	150	2.031.456.679	5.398.259.760	100%	94,56 %	100%	95,17 %	100%	100,00 %	96,76 %	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	"Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	20 Dokumen	60	18.795.000	20	7.375.000	20	11.420.000	20	-	18.795.000	20	7.140.000	20	11.213.250	20	-	18.353.250	100%	96,81 %	100%	98,19 %	100%	0,00 %	97,65 %	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	18	175.900.000	6	55.000.000	6	65.900.000	6	55.000.000	175.900.000	6	30.513.000	6	64.297.000	6	44.800.000	139.610.700	100%	55,48 %	100%	97,57 %	100%	81,45 %	79,37 %	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...						REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH		RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	pada SKPD																									
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>6.045.764.451</b>	<b>1</b>	<b>2.550.471.450</b>	<b>1</b>	<b>2.445.545.500</b>	<b>1</b>	<b>1.049.747.501</b>	<b>6.045.764.451</b>	<b>1</b>	<b>1.968.067.500</b>	<b>1</b>	<b>2.231.954.000</b>	<b>1</b>	<b>1.047.750.000</b>	<b>5.247.771.500</b>	<b>100%</b>	<b>77,16%</b>	<b>100%</b>	<b>91,27%</b>	<b>100%</b>	<b>99,81%</b>	<b>86,80%</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	9	2.070.375.000	3	1.470.000.000	3	-	3	600.375.000	2.070.375.000	3	1.408.000.000	3	-	3	600.300.000	2.008.300.000	100%	95,78%	100%	0,00%	100%	99,99%	97,00%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	300	204.177.400	100	24.877.400	100	166.300.000	100	13.000.000	204.177.400	100	24.787.500	100	134.100.000	100	12.750.000	171.637.500	100%	99,64%	100%	80,64%	100%	98,08%	84,06%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	9	955.387.650	3	148.182.950	3	449.183.500	3	358.021.200	955.387.650	3	143.315.000	3	290.950.000	3	358.000.000	792.265.000	100%	96,71%	100%	64,77%	100%	99,99%	82,93%	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	1	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000							-	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	60	2.315.824.401	20	407.411.100	20	1.830.062.000	20	78.351.301	2.315.824.401	20	391.965.000	20	1.806.904.000	20	76.700.000	2.275.569.000	100%	96,21%	100%	98,73%	100%	97,89%	98,26%	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>19.910.641.195</b>	<b>1</b>	<b>6.391.317.792</b>	<b>1</b>	<b>6.954.079.865</b>	<b>1</b>	<b>6.565.243.538</b>	<b>19.910.641.195</b>	<b>1</b>	<b>5.955.346.907</b>	<b>1</b>	<b>6.682.548.315</b>	<b>1</b>	<b>6.329.055.989</b>	<b>18.966.951.211</b>	<b>100%</b>	<b>93,18%</b>	<b>100%</b>	<b>96,10%</b>	<b>100%</b>	<b>96,40%</b>	<b>95,26%</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	50000 Surat	15000	15.150.000	50000	7.500.000	50000	7.650.000	50000	-	15.150.000	50000	4.000.000	50000	7.600.000	50000	-	11.600.000	100%	53,33%	100%	99,35%	100%	0,00%	76,57%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Listrik Telpn PDAM koneksi internet dan jasa sambung tv kabel yang di bayar 1 Tahun	40 Rekening	120	3.823.825.992	40	1.226.432.478	40	1.433.455.200	40	1.163.938.314	3.823.825.992	40	1.138.907.357	40	1.317.970.697	40	1.060.524.257	3.517.402.311	100%	92,86%	100%	91,94%	100%	91,12%	91,99%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 laporan	30	1.928.757.917	10	474.150.800	10	804.138.325	10	650.468.792	1.928.757.917	10	291.059.510	10	774.187.500	10	640.285.500	1.705.532.510	100%	61,39%	100%	96,28%	100%	98,43%	88,43%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIA TAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...						JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	274 Tenaga Honor dan THL	822	14.142.907.286	274	4.683.234.514	274	4.708.836.340	274	4.750.836.432	14.142.907.286	274	4.521.380.040	274	4.582.790.118	274	4.628.246.232	13.732.416.390	100%	96,54%	100%	97,32%	100%	97,42%	97,10%	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Kondisi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>6.663.834.845</b>	<b>1</b>	<b>4.091.365.150</b>	<b>1</b>	<b>1.674.933.395</b>	<b>1</b>	<b>897.536.300</b>	<b>6.663.834.845</b>	<b>1</b>	<b>3.250.304.766</b>	<b>1</b>	<b>1.651.283.320</b>	<b>1</b>	<b>796.148.900</b>	<b>5.697.736.986</b>	<b>100%</b>	<b>79,44%</b>	<b>100%</b>	<b>98,59%</b>	<b>100%</b>	<b>88,70%</b>	<b>85,50%</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 unit	108	2.296.250.100	36	712.860.000	36	962.961.800	36	620.428.300	2.296.250.100	36	712.455.616	36	962.852.250	36	562.803.000	2.238.110.866	100%	99,94%	100%	99,99%	100%	90,71%	97,47%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	90	169.000.000	30	47.000.000	30	55.000.000	30	67.000.000	169.000.000	30	44.539.000	30	43.190.100	30	63.445.900	151.175.000	100%	94,76%	100%	78,53%	100%	94,70%	89,45%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	60	24.040.000	20	21.000.000	20	3.040.000	20	-	24.040.000	20	20.850.000	20	-	20	-	20.850.000	100%	99,29%	100%	0,00%	100%	0,00%	86,73%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 unit	429	1.040.175.775	143	325.705.150	143	504.362.625	143	210.108.000	1.040.175.775	143	325.648.461	143	496.237.000	143	169.900.000	991.785.461	100%	99,98%	100%	98,39%	100%	80,86%	95,35%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	9	3.134.368.970	3	2.984.800.000	3	149.568.970	3	-	3.134.368.970	3	2.146.811.689	3	149.003.970	3	-	2.295.815.659	100%	71,92%	100%	99,62%	100%	0,00%	73,25%	
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>2.199.035.225</b>	<b>1</b>	<b>800.637.600</b>	<b>1</b>	<b>739.176.000</b>	<b>1</b>	<b>659.221.625</b>	<b>2.199.035.225</b>	<b>1</b>	<b>753.431.366</b>	<b>1</b>	<b>621.651.957</b>	<b>1</b>	<b>597.308.690</b>	<b>1.972.392.013</b>	<b>100%</b>	<b>94,10%</b>	<b>100%</b>	<b>84,10%</b>	<b>100%</b>	<b>90,61%</b>	<b>89,69%</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/bulan	84	555.835.225	28	189.837.600	28	191.976.000	28	174.021.625	555.835.225	28	177.631.366	28	179.651.957	28	152.408.690	509.692.013	100%	93,57%	100%	93,58%	100%	87,58%	91,70%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...						JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Stel	18	350.200.00	6	179.800.000	6	85.200.00	6	85.200.00	350.200.00	6	179.800.000	6	46.000.00	6	78.900.00	304.700.00	100%	100,00 %	100%	53,99 %	100%	92,61 %	87,01 %	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/bulan	84	1.200.000.000	28	400.000.000	28	400.000.000	28	400.000.000	1.200.000.000	28	396.000.000	28	396.000.000	28	366.000.000	1.158.000.000	100%	99,00 %	100%	99,00 %	100%	91,50 %	96,50 %	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	93.000.00	4	31.000.00	4	62.000.00	-	93.000.00	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00 %	0,00 %	
<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>3.537.662.000</b>	<b>1</b>	<b>1.318.066.000</b>	<b>1</b>	<b>1.049.100.000</b>	<b>1</b>	<b>1.170.496.000</b>	<b>3.537.662.000</b>	<b>1</b>	<b>1.314.672.025</b>	<b>1</b>	<b>1.041.512.000</b>	<b>1</b>	<b>1.129.913.500</b>	<b>3.486.097.525</b>	<b>100%</b>	<b>99,74 %</b>	<b>100%</b>	<b>99,28 %</b>	<b>100%</b>	<b>96,53 %</b>	<b>98,54 %</b>	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	12 Bulan	36	1.914.000.000	12	790.800.000	12	561.600.000	12	561.600.000	1.914.000.000	12	790.780.000	12	559.912.000	12	554.953.500	1.905.645.500	100%	100,00 %	100%	99,70 %	100%	98,82 %	99,56 %	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan	36	1.264.800.000	12	441.600.000	12	441.600.000	12	381.600.000	1.264.800.000	12	440.977.000	12	439.912.000	12	356.693.000	1.237.582.000	100%	99,86 %	100%	99,62 %	100%	93,47 %	97,85 %	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Tersedia	1 Tahun	3	358.862.000	1	85.666.000	1	45.900.000	1	227.296.000	358.862.000	1	82.915.025	1	41.688.000	1	218.267.000	342.870.025	100%	96,79 %	100%	90,82 %	100%	96,03 %	95,54 %	
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>1.705.853.950</b>	<b>1</b>	<b>607.047.950</b>	<b>1</b>	<b>710.000.000</b>	<b>1</b>	<b>388.806.000</b>	<b>1.705.853.950</b>	<b>1</b>	<b>605.272.773</b>	<b>1</b>	<b>684.731.175</b>	<b>1</b>	<b>372.485.937</b>	<b>1.662.489.885</b>	<b>100%</b>	<b>99,71 %</b>	<b>100%</b>	<b>96,44 %</b>	<b>100%</b>	<b>95,80 %</b>	<b>97,46 %</b>	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	43 Dokumen	129	625.316.250	43	228.045.250	43	265.500.000	43	131.771.000	625.316.250	43	227.068.974	43	262.245.550	43	127.204.558	616.519.082	100%	99,57 %	100%	98,77 %	100%	96,53 %	98,59 %	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 OPD	60	420.488.000	20	157.204.000	20	194.500.000	20	68.784.000	420.488.000	20	156.640.459	20	193.790.075	20	67.790.000	418.221.134	100%	99,64 %	100%	99,64 %	100%	98,56 %	99,46 %	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	6	560.832.700	2	221.798.700	2	250.000.000	2	89.034.000	560.832.700	2	221.563.340	2	228.695.550	2	85.635.979	535.894.869	100%	99,89 %	100%	91,48 %	100%	96,18 %	95,55 %	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...								JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
			TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	38.387.000	0	-	0	-	1	38.387.000	38.387.000	0	-	0	-	40	37.700.200	37.700.200	0%	0,00%	0%	0,00%	4000%	98,21%	98,21%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	60.830.000	0	-	0	-	2	60.830.000	60.830.000	0	-	0	-	2	54.154.600	54.154.600	0%	0,00%	0%	0,00%	100%	89,03%	89,03%	
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi dan Ter dokumentasi dengan baik</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>2.367.175.600</b>	<b>1</b>	<b>716.550.200</b>	<b>1</b>	<b>1.090.562.400</b>	<b>1</b>	<b>560.063.000</b>	<b>2.367.175.600</b>	<b>1</b>	<b>708.268.568</b>	<b>1</b>	<b>1.039.537.085</b>	<b>1</b>	<b>559.786.912</b>	<b>2.307.592.565</b>	<b>100%</b>	<b>98,84%</b>	<b>100%</b>	<b>95,32%</b>	<b>100%</b>	<b>99,95%</b>	<b>97,48%</b>	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	20 laporan	60	525.435.200	20	169.269.200	20	252.000.000	20	104.166.000	525.435.200	20	168.251.600	20	242.277.433	20	103.993.738	514.522.771	100%	99,40%	100%	96,14%	100%	99,83%	97,92%	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	20 laporan	60	563.281.000	20	150.885.000	20	312.000.000	20	100.396.000	563.281.000	20	144.183.600	20	282.158.528	20	100.354.915	526.697.043	100%	95,56%	100%	90,44%	100%	99,96%	93,51%	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	20 laporan	60	1.278.459.400	20	396.396.000	20	526.562.400	20	355.501.000	1.278.459.400	20	395.833.368	20	515.101.124	20	355.438.259	1.266.372.751	100%	99,86%	100%	97,82%	100%	99,98%	99,05%	
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu; Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra; Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.393.969.170</b>	<b>100%</b>	<b>6.425.195.400</b>	<b>100%</b>	<b>8.123.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.845.273.770</b>	<b>20.393.969.170</b>	<b>100%</b>	<b>6.397.118.402</b>	<b>100%</b>	<b>7.894.247.192</b>	<b>100%</b>	<b>2.070.495.156</b>	<b>16.361.860.750</b>	<b>100%</b>	<b>99,56%</b>	<b>100%</b>	<b>97,18%</b>	<b>100%</b>	<b>35,42%</b>	<b>80,23%</b>	
Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	1 Tahun	3	3.138.482.500	1	1.079.682.600	1	1.077.000.000	1	981.799.900	3.138.482.500	1	1.073.188.558	1	1.044.280.481	1	959.186.670	3.076.655.709	100%	99,40%	100%	96,96%	100%	97,70%	98,03%	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	15	1.932.513.500	5	620.695.400	5	618.000.000	5	693.818.100	1.932.513.500	5	616.801.554	5	614.704.175	5	689.112.545	1.920.618.274	100%	99,37%	100%	99,47%	100%	99,32%	99,38%	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	15	374.163.160	5	133.054.200	5	204.000.000	5	37.108.960	374.163.160	5	130.995.594	5	197.523.222	5	35.459.100	363.977.916	100%	98,45%	100%	96,83%	100%	95,55%	97,28%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...						JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	3	831.805.840	1	325.933.000	1	255.000.000	1	250.872.840	831.805.840	1	325.391.410	1	232.053.084	1	234.615.025	792.059.519	100%	99,83%	100%	91,00%	100%	93,52%	95,22%	
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>15.382.229.100</b>	<b>1</b>	<b>4.696.195.800</b>	<b>1</b>	<b>6.284.000.000</b>	<b>1</b>	<b>4.402.033.300</b>	<b>15.382.229.100</b>	<b>1</b>	<b>4.682.520.144</b>	<b>1</b>	<b>6.101.800.492</b>	<b>1</b>	<b>653.717.638</b>	<b>11.438.038.274</b>	<b>100%</b>	<b>99,71%</b>	<b>100%</b>	<b>97,10%</b>	<b>100%</b>	<b>14,85%</b>	<b>74,36%</b>	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	30	14.906.168.300	10	4.534.820.000	10	6.087.820.000	10	4.283.528.300	14.906.168.300	10	4.522.212.973	10	5.909.257.244	10	536.529.219	10.967.999.436	100%	99,72%	100%	97,07%	100%	12,53%	73,58%	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen	9	338.558.000	3	105.209.000	3	132.600.000	3	100.749.000	338.558.000	3	104.164.684	3	130.019.002	3	99.605.519	333.789.205	100%	99,01%	100%	98,05%	100%	98,87%	98,59%	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Paket	3	137.502.800	1	56.166.800	1	63.580.000	1	17.756.000	137.502.800	1	56.142.487	1	62.524.246	1	17.582.900	136.249.633	100%	99,96%	100%	98,34%	100%	99,03%	99,09%	
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Telaksananya Penyusunan produk Hukum, Batuan Hukum dan Perdokumentasi Produk Hukum Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1.873.257.570</b>	<b>100</b>	<b>649.317.000</b>	<b>100</b>	<b>762.500.000</b>	<b>100</b>	<b>461.440.570</b>	<b>1.873.257.570</b>	<b>1</b>	<b>641.409.700</b>	<b>1</b>	<b>748.166.219</b>	<b>1</b>	<b>457.590.848</b>	<b>1.847.166.767</b>	<b>1%</b>	<b>98,78%</b>	<b>1%</b>	<b>98,12%</b>	<b>1%</b>	<b>99,17%</b>	<b>98,61%</b>	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	564 Dokumen	1692	562.204.600	564	181.608.000	564	244.000.000	564	136.596.600	562.204.600	564	181.549.700	564	241.185.969	564	133.671.715	556.407.384	100%	99,97%	100%	98,85%	100%	97,86%	98,97%	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	12	800.249.970	4	283.237.000	4	336.000.000	4	181.012.970	800.249.970	4	280.941.500	4	328.214.400	4	180.619.450	789.775.350	100%	99,19%	100%	97,68%	100%	99,78%	98,69%	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	15 Perda	45	510.803.000	15	184.472.000	15	182.500.000	15	143.831.000	510.803.000	15	178.918.500	15	178.765.850	15	143.299.683	500.984.033	100%	96,99%	100%	97,95%	100%	99,63%	98,08%	
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan; Persentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan</b>	<b>100 ; 100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>3.986.109.520</b>	<b>100 %</b>	<b>1.624.921.670</b>	<b>100 %</b>	<b>1.468.820.150</b>	<b>100 %</b>	<b>892.367.700</b>	<b>3.986.109.520</b>	<b>100 %</b>	<b>1.549.967.632</b>	<b>100 %</b>	<b>1.372.429.156</b>	<b>100%</b>	<b>858.467.115</b>	<b>3.780.863.903</b>	<b>100%</b>	<b>95,39%</b>	<b>100%</b>	<b>93,44%</b>	<b>100%</b>	<b>96,20%</b>	<b>94,85%</b>	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...								JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
			TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Terlaksananya Kebijakan Pemerintah di bidang Perekonomian</b>	1 Tahun	3	845.016.800	1	479.114.000	1	289.570.000	1	76.332.800	845.016.800	1	478.721.243	1	256.897.586	1	68.886.500	804.505.329	100%	99,92%	100%	88,72%	100%	90,24%	95,21%	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	1 Dokumen	3	479.034.800	1	337.636.000	1	102.000.000	1	39.398.800	479.034.800	1	337.243.243	1	78.932.966	1	33.369.700	449.545.909	100%	99,88%	100%	77,39%	100%	84,70%	93,84%	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	5 Laporan	15	194.562.000	5	64.889.000	5	105.970.000	5	23.703.000	194.562.000	5	64.889.000	5	101.875.800	5	23.699.700	190.464.500	100%	100,00%	100%	96,14%	100%	99,99%	97,89%	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	1 Laporan	3	171.420.000	1	76.589.000	1	81.600.000	1	13.231.000	171.420.000	1	76.589.000	1	76.088.20	1	11.817.100	164.494.920	100%	100,00%	100%	93,25%	100%	89,31%	95,96%	
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Administrasi dan Pelaporan di bidang Pembangunan</b>	1 Tahun	3	643.218.900	1	301.207.000	1	271.400.000	1	70.611.900	643.218.900	1	299.717.839	1	252.337.120	1	66.821.59	618.876.118	100%	99,51%	100%	92,98%	100%	94,63%	96,22%	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 Dokumen	30	253.530.000	10	135.141.000	10	88.200.000	10	30.189.000	253.530.000	10	134.471.471	10	83.884.26	10	29.004.528	247.360.225	100%	99,50%	100%	95,11%	100%	96,08%	97,57%	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian	1 laporan	3	167.737.000	1	71.784.000	1	81.600.000	1	14.353.000	167.737.000	1	71.566.957	1	67.514.855	1	14.332.16	153.413.928	100%	99,70%	100%	82,74%	100%	99,85%	91,46%	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	1 laporan	3	221.951.900	1	94.282.000	1	101.600.000	1	26.069.900	221.951.900	1	93.679.411	1	100.938.039	1	23.484.515	218.101.965	100%	99,36%	100%	99,35%	100%	90,08%	98,27%	
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	100%	3	1.448.961.620	100%	556.031.670	100%	613.050.150	100%	279.879.800	1.448.961.620	100%	504.006.050	100%	572.638.076	100%	266.126.846	1.342.770.972	100%	90,64%	100%	93,41%	100%	95,09%	92,67%	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	2 Laporan	6	727.113.420	2	271.292.170	2	276.850.150	2	178.971.100	727.113.420	2	238.619.250	2	245.420.883	2	169.879.850	653.919.983	100%	87,96%	100%	88,65%	100%	94,92%	89,93%	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	17 kecamatan	51	251.811.900	17	80.685.000	17	132.600.000	17	38.526.900	251.811.900	17	78.679.650	17	129.239.585	17	37.773.286	245.692.521	100%	97,51%	100%	97,47%	100%	98,04%	97,57%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN...								JUMLAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	RASIO CAPAIAN TAHUN...						JUMLAH	
			TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 orang	450	470.036.300	150	204.054.500	150	203.600.000	150	62.381.800	470.036.300	150	186.707.150	150	197.977.608	150	58.473.710	443.158.468	100%	91,50 %	100%	97,24 %	100%	93,74 %	94,28 %	
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>3</b>	<b>1.048.912.200</b>	<b>1</b>	<b>288.569.000</b>	<b>1</b>	<b>294.800.000</b>	<b>1</b>	<b>465.543.200</b>	<b>1.048.912.200</b>	<b>1</b>	<b>267.522.500</b>	<b>1</b>	<b>290.556.374</b>	<b>1</b>	<b>456.632.610</b>	<b>1.014.711.484</b>	<b>100%</b>	<b>92,71 %</b>	<b>100%</b>	<b>98,56 %</b>	<b>100%</b>	<b>98,09 %</b>	<b>96,74 %</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	3	600.234.000	1	72.020.000	1	131.600.000	1	396.614.000	600.234.000	1	67.059.000	1	130.068.400	1	393.917.610	591.045.010	100%	93,11 %	100%	98,84 %	100%	99,32 %	98,47 %	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	6	265.106.200	2	149.500.000	2	81.600.000	2	34.006.200	265.106.200	2	138.626.900	2	81.233.274	2	30.919.700	250.779.874	100%	92,73 %	100%	99,55 %	100%	90,92 %	94,60 %	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	5 Dokumen	15	183.572.000	5	67.049.000	5	81.600.000	5	34.923.000	183.572.000	5	61.836.600	5	79.254.700	5	31.795.300	172.886.600	100%	92,23 %	100%	97,13 %	100%	91,04 %	94,18 %	



## **2.5. KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

Sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administratif, koordinatif, fasilitatif, dan analitis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah terdiri dari berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintahan daerah.

### **1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Kelompok sasaran utama Sekretariat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah. Layanan yang diberikan mencakup:

- Dukungan administrasi perkantoran;
- Tata usaha dan jadwal kegiatan pimpinan;
- Pelayanan rumah tangga dan kendaraan dinas;
- Fasilitasi kegiatan keprotokolan dan komunikasi publik.

### **2. Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah/OPD)**

Sekretariat Daerah memberikan layanan koordinasi, fasilitasi, dan dukungan kebijakan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Pelayanan mencakup:

- Fasilitasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- Dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;
- Koordinasi lintas sektor;
- Pelayanan administrasi kepegawaian dan hukum.

### **3. DPRD Kabupaten Bengkayang**

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah juga menjadi penghubung dan penyedia layanan administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terutama terkait:

- Koordinasi penyampaian dokumen perencanaan dan keuangan daerah;
- Dukungan protokoler dalam kegiatan resmi daerah;
- Fasilitasi komunikasi antara eksekutif dan legislatif;



#### 4. Instansi Vertikal dan Pemerintah Atas (Provinsi/Pusat)

Sekretariat Daerah memfasilitasi hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan:

- Instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Kementerian/Lembaga di tingkat pusat Layanan meliputi penyampaian data, fasilitasi kebijakan pusat, penyusunan laporan, dan penyesuaian regulasi.

#### 5. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya (Tidak Langsung)

Meskipun tidak memberikan pelayanan publik secara langsung, Sekretariat Daerah berkontribusi terhadap pelayanan publik melalui:

- Penguatan sistem manajemen pemerintahan;
- Dukungan komunikasi publik dan pelayanan informasi;
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah;
- Pelayanan pengaduan masyarakat (melalui koordinasi dengan perangkat teknis).

### **2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

Permasalahan dan isu strategis merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan strategis. Permasalahan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi eksisting saat ini dengan kondisi yang diharapkan (target), baik dari sisi kinerja kelembagaan, sumber daya, maupun capaian pelayanan. Sementara itu, isu strategis adalah hal-hal pokok, mendesak, berdampak besar, dan perlu segera ditangani atau ditindaklanjuti, yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan profesional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, yang ditandai dengan belum terpadu dan efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi



- koordinasi lintas sektor serta kurangnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal kompetensi, kedisiplinan, serta pelayanan administrasi dan kepegawaian;
  3. Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal sistem pelaporan, pengukuran, dan evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya berbasis hasil dan akuntabilitas publik;
  4. Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan batas eksisting wilayah, baik antar kelurahan, kecamatan, maupun dengan kabupaten/kota lain, yang berdampak pada ketidakpastian perencanaan pembangunan wilayah;
  5. Belum optimalnya kerjasama daerah, baik dalam bentuk kemitraan antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
  6. Belum terinventarisir secara optimal potensi risiko sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan, sehingga belum terdapat sistem mitigasi risiko yang efektif untuk mencegah konflik horizontal dan isu-isu intoleransi;
  7. Belum optimalnya perumusan kebijakan di bidang budaya, pendidikan, dan kesehatan, yang memerlukan fasilitasi lintas sektor dan sinergi antar Perangkat Daerah yang lebih terarah;
  8. Belum optimalnya ketersediaan data terkait rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan ormas, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan kebijakan dan pemberian bantuan sosial keagamaan;
  9. Belum optimalnya proses inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang masih terkendala oleh ketidakterpaduan data dan minimnya koordinasi antar pihak terkait;
  10. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum dan tenaga teknis publikasi hukum, serta belum optimalnya kebijakan bantuan hukum dan perlindungan HAM, baik



bagi masyarakat umum maupun ASN dan pihak swasta yang berkaitan dengan iklim investasi;

11. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, yang menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan hukum pemerintah;
12. Belum optimalnya penataan perekonomian daerah, yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) analisis ekonomi dan lemahnya koordinasi serta pelaporan kegiatan ekonomi lintas Perangkat Daerah;
13. Penyusunan program pembangunan dan pengendalian masih belum sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis dan menghadapi kendala penganggaran, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan Pembangunan;
14. Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku pengadaan, dinamika regulasi, serta minimnya sarana, prasarana, dan personil UKPBJ yang professional;
15. Kurangnya minat ASN untuk menjadi JF PPBJ akibat beban kerja yang berat dan risiko hukum yang tinggi, serta sulitnya memenuhi persyaratan kompetensi untuk jabatan tersebut;
16. Belum optimalnya fasilitasi sarana dan prasarana aparatur serta pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan administrasi dan masih digunakannya metode manual yang tidak efisien;
17. Belum terintegrasinya data kepegawaian secara digital, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas SDM dalam mengelola administrasi modern;
18. Belum optimalnya kebijakan teknis terkait analisis jabatan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi, termasuk penilaian zona integritas, AKIP, dan SAKIP OPD yang masih rendah, serta keterbatasan SDM bidang organisasi dan kinerja;
19. Belum optimalnya pengelolaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, serta kurangnya efektivitas penyampaian informasi dan pengaturan



jadwal kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah, yang menghambat fungsi keprotokolan dan komunikasi publik;

20. Belum optimalnya pengelolaan retribusi dan penyusunan administrasi keuangan, serta masih lemahnya inventarisasi aset dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, yang disebabkan oleh keterbatasan dokumen dan informasi aset.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan profesional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan identifikasi terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Permasalahan utama terletak pada lemahnya kapasitas koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah, yang menghambat optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Kualitas pelayanan aparatur, baik dari segi kompetensi, kedisiplinan, maupun pengelolaan administrasi dan kepegawaian, masih belum memadai. Di sisi lain, sistem pelaporan, evaluasi, dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil dan belum didukung dengan data yang akurat serta teknologi informasi yang terintegrasi.

Persoalan lain yang turut memperburuk efektivitas tata kelola adalah belum tertatanya data wilayah dan batas administrasi, terbatasnya kerjasama antardaerah maupun dengan pihak ketiga, serta belum optimalnya mitigasi risiko sosial dan fasilitasi keagamaan. Di bidang pelayanan hukum dan HAM, masih terdapat kekurangan tenaga profesional serta lemahnya monitoring terhadap produk hukum daerah.

Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan serta pengadaan barang/jasa masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman regulasi, keterbatasan anggaran, dan minimnya tenaga teknis profesional, khususnya pada UKPBJ dan jabatan fungsional pengadaan. Aspek kelembagaan, reformasi birokrasi, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan juga menunjukkan kelemahan yang memerlukan perhatian khusus.



Kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan, inventarisasi aset, serta tindak lanjut temuan pemeriksaan menunjukkan masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan rendahnya kapasitas SDM di berbagai bidang strategis pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi SDM, mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan, serta memperbaiki tata kelola manajerial dan koordinatif, guna mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **2.7. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS SESUAI LINGKUNGAN DINAMIS**

Isu Strategis adalah permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menuntut perhatian, kebijakan, dan tindakan strategis dalam jangka menengah hingga panjang. Isu strategis muncul sebagai hasil dari identifikasi faktor internal dan eksternal, termasuk dinamika lingkungan, kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, serta kemampuan dan sumber daya organisasi.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tuntutan perubahan yang cepat, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang harus menyikapi berbagai isu strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

### **1. Isu Strategis Internal Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tantangan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, taat asas, kolaboratif, dan berintegritas, serta masih terbatasnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance;
2. Kualitas pelayanan publik yang belum merata dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu peningkatan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan.



3. Masih rendahnya efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdampak pada optimalisasi anggaran dan akuntabilitas keuangan daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kapasitas ASN, khususnya dalam penerapan teknologi informasi dan sistem administrasi digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi modern.
5. Rendahnya kinerja kelembagaan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, aset daerah (BMD), dan perencanaan program yang berbasis elektronik, yang harus diperkuat untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
6. Pengelolaan bantuan hibah di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang masih memerlukan optimalisasi agar tepat sasaran dan akuntabel.
7. Keterbatasan dalam menghasilkan produk hukum daerah yang adaptif dan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penyelesaian permasalahan hukum daerah yang belum maksimal.
8. Belum optimalnya peran keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang strategis.

## **2. Isu Strategis Global**

Perkembangan global memberikan peluang sekaligus tantangan yang harus direspon dengan kebijakan dan inovasi lokal. Beberapa isu strategis global yang memengaruhi Sekretariat Daerah antara lain:

1. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan inklusif agar dapat bersaing dalam konteks global dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.
2. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability) dalam seluruh kebijakan dan program daerah sebagai respons terhadap isu lingkungan global dan komitmen nasional.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola ASN secara global, menuntut percepatan adaptasi daerah.



4. Tantangan dalam pengadaan berkelanjutan, termasuk keterbatasan transparansi rantai pasok, akses teknologi hijau yang belum merata, dan perbedaan standar lingkungan internasional yang harus diselaraskan dengan praktik daerah.
5. Peningkatan tuntutan terhadap pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan responsif, khususnya terkait isu HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, yang menjadi agenda penting dalam tata kelola pemerintahan modern.

### **3. Isu Strategis Nasional**

Secara nasional, terdapat berbagai isu struktural yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan daerah agar selaras dan mendukung pencapaian tujuan nasional, di antaranya:

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.
2. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
3. Rendahnya efektivitas pembinaan, inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan yang menjadi bagian penting dalam harmonisasi sosial dan keberagaman masyarakat.
4. Investasi yang belum dikelola secara terpadu serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah (BMD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
5. Kebutuhan digitalisasi dan penyusunan program kerja yang berbasis kewenangan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan.
6. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam pengadaan berkelanjutan dan kurangnya integrasi regulasi lingkungan dalam proses pengadaan daerah.
7. Peningkatan tuntutan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang harus mengikuti dinamika nasional agar mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang kuat.
8. Belum optimalnya pemanfaatan produk lokal dalam sistem pengadaan daerah sebagai upaya mendorong ekonomi lokal dan kemandirian.



#### **4. Isu Strategis Regional**

Lingkungan regional menghadirkan tantangan tersendiri yang memerlukan kolaborasi antar daerah dan penyesuaian kebijakan yang sinergis, yaitu:

1. Rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur di tingkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pelayanan publik yang responsif.
2. Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan daerah, termasuk rendahnya capaian penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas pelayanan publik di tingkat regional.
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah serta lemahnya penyelesaian perkara hukum non-litigasi yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi daerah.
4. Terbatasnya basis ekonomi daerah yang dapat berperan sebagai penggerak utama dinamika perekonomian regional.
5. Minimnya infrastruktur pendukung pengadaan berkelanjutan dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap tekanan lingkungan dan ekonomi.
6. Belum terbangunnya kolaborasi efektif antar daerah dalam menerapkan kebijakan lingkungan dan pengadaan hijau yang mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

#### **2.8. RUMUSAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah adalah pernyataan yang menggambarkan permasalahan utama, tantangan, atau hal-hal penting yang harus segera diatasi atau dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Isu strategis disusun berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi aktual yang mencakup aspek internal dan eksternal, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional, rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Isu strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang bersifat prioritas, dan menjadi pijakan dalam menentukan arah pencapaian visi dan misi kepala daerah.



Data Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.8.



**Tabel 2.8  
Teknik menyimpulkan Isu Stategis Sekretariat Daerah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH PD
			GLOBAL (sumber RPJMN)	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>	belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	<i>rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang no 7 Tahun 2014</i>	<i>belum optimalnya kualitas layanan publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang efektif, efisiem dan berjangkau</i>	<i>belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik</i>	<i>belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik</i>	<i>Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, dukungan good governance dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</i>
	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintahan daerah	meskipun tidak berkaitan langsung dengan RTRW dan KLHS pada RPJMD tetapi Sekretariat Daerah berkewajiban untuk ikut mendukung pelaksanaan KLDH dan RTRW			<i>belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintaha</i>	
	belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah					
	Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas eksis ting wilayah sesuai kewenangan daerah baik batas antar kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain.					
	Belum optimalnya kerjasama daerah					
<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Belum ter inventarisir secara optimal potensi resiko sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial dan keagamaan		<i>Tuntutan peningkatan kualitas Pembinaan dan pelayanan Bidang Keagamaan</i>	<i>Belum Optimalnyapembinaan, inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan bidang keagamaan</i>	<i>Adanya Pembinaan, inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan bidang keagamaan</i>	<i>optimalisasi Pembinaan, inventarisasi, verifikasi, monev dan pemberian hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat</i>



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

	Belum optimal nya rumusan kebijakan bidang budaya, pendidikan dan kesehatan					
	Belum optimal nya ketersediaan data terkait keberadaan rumah ibadah, organisasi, lembaga dan ormas keagamaan					
	Belum optimal nya inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan					
<b>BAGIAN HUKUM</b>	Masih kurangnya tenaga penyusunan produk hukum dan tenaga teknis publikasi produk hukum		<i>rendahnya kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara sehingga harus dilakukan reformasi hukum dan pencegahan serta pemberantasan korupsi</i>	Tumpang Tindih aturan Pusat dan Daerah	<i>belum optimalnya kualitas/kuantitas produk hukum yang dihasilkan</i>	Optimalisasi produk hukum yang dihasilkan, penyelesaian perkara hukum dan permasalahan hukum serta analisis dan evaluasi produk hukum daerah
	Belum optimal nya kebijakan bantuan dan keberpihakan hukum dan HAM bagi masyarakat, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan atau bagi pihak swasta yang mendorong daya saing investasi daerah		rendahnya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi dan rendahnya kebijakan terhadap HAM	Tumpang Tindih aturan Pusat dan Daerah	Belum optimalnya penanganan perkara Non Litigasi	
	Masih belum optimal nya monitoring dan evaluasi produk hukum daerah		rendahnya produk hukum yang menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi	Tumpang Tindih aturan Pusat dan Daerah	Belum optimalnya analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	
<b>BAGIAN EKON DAN SDA</b>	Masih belum optimal nya penataan dan permasalahan perekonomian; Pemerintah		<i>pemerataan perekonomian</i>	<i>investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian</i>	<i>belum tumbuhnya basis ekonomi daerah yang mampu menjadi daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah</i>	Pengembangan kegiatan investasi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan dan produk unggulan daerah dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
	Kurangnya SDM pengolah data dan analisis perekonomian		<i>belum terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan</i>	<i>pembentukan/ penataan kelembagaan yang bertugas mengelola investasi, mengelola BUMD yang merupakan langkah krusial dalam</i>		



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

				<i>mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu sehingga tata kelola investasi menjadi lebih transparan dan akuntabel dan akan mendorong aset - aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.</i>		
	Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan dibidang perekonomian pada perangkat daerah terkait		<i>belum tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan</i>			
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	Penyusunan program pembangunan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan yang kurang mempedomani petunjuk teknis dan keterbatasan dalam penganggaran	<i>pembangunan yang memperhatikan Dampak dari 1. perubahan iklim seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan risiko bencana alam, 2.Pencemaran: Pencemaran udara, air, dan tanah oleh bahan kimia, limbah, dan polusi lainnya. 3. Penggunaan Sumber Daya Alam: Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan air, hutan, dan mineral.</i>	<i>Tuntutan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan</i>	<i>kemudahan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik. dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan</i>	<i>optimalisasi penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan</i>	<i>penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi</i>
<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	Belum optimal nya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang disebabkan Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan		<i>perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan layanan</i>	<i>adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data terintegrasi</i>	<i>adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data terintegrasi</i>	<i>optimalisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah</i>
	Regulasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersifat dinamis,yang memerlukan pelaku					



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

	pengadaan yang bisa menyesuaikan dengan regulasi dimaksud					
	Masih belum optimal nya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
	<i>Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan</i>					
	<i>Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka melaksakan penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa</i>					
	Belum optimal nya personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan					
	<i>Sulitnya persyaratan kompetensi untuk lulus menjadi JF PPBJ</i>					
	<i>Kurang terariknya ASN untuk menjadi JF PPBJ karena besarnya risiko hukum dan beban pekerjaan yang berat.</i>					
<b>BAGIAN UMUM</b>	Belum optimal nya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian		Tuntutan pelayanan publik berbasis digital dan efisiensi tata kelola ASN secara nasional			<i>Optimalisasi fasilitasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kualitas dan efektivitas layanan administrasi kepegawaian, penguatan sistem informasi kepegawaian dan digitalisasi arsip, peningkatan kompetensi ASN dalam pengelolaan administrasi berbasis digital, serta penguatan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berintegritas.</i>
	Belum optimal nya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		Transformasi digital ASN dan sistem pelayanan publik secara nasional			
	Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian		Globalisasi kompetensi ASN dan adaptasi teknologi			
	Ketidakterpaduan data		Kebutuhan global akan tata			



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

	kepegawaian dan dokumen kepegawaian secara digital		kelola administrasi yang informatif, komunikatif dan akuntabel			
	Rendahnya kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi					
	Masih ditemukan praktik administrasi manual yang lambat dan tidak efisien					
<b>BAGIAN ORTAL</b>						
	Belum optimal nya kebijakan teknis terkait analisis jabatan		<i>Transformasi tata kelola memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi untuk mencegah dan menanggulangi tindakan tindak yang merugikan masyarakat langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang</i>		<i>belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan</i>	<i>peningkatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan penilaian SAKIP OPD dan pelayanan publik</i>
	Belum optimal nya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan publik pada unit pelayanan publik (UPP) Ombudsman		<i>Kualitas layanan publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang efektif, efisien dan berjangkau</i>		<i>masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik</i>	
	Masih belum optimal nya penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan perangkat Daerah				<i>masih rendahnya penilaian SAKIP OPD dan pelayanan publik</i>	
	Masih rendahnya penilaian zona integritas, reformasi birokrasi, AKIP Kabupaten dan SAKIP OPD, dan pelayanan publik					
	Jumlah dan kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Organisasi,					
	ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja yang belum memadai					
	Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik					
	Belum sepenuhnya efektif					



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

	penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan					
<b>BAGIAN PROTOKOL</b>						
	Belum optimal nya kebijakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		<i>Tuntutan keprotokolan, komunikasi pimpinan</i>	<i>Tuntutan keprotokolan, komunikasi pimpinan</i>	<i>belum optimalnya penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan</i>	<i>optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan</i>
	Belum optimal nya kebijakan penyampaian informasi dan publikasi kegiatan KDH dan WKDH					
	Belum optimumnya kebijakan pengaturan akomodasi, pengamanan acara tamu					
	Belum optimumnya kebijakan pengaturan jadwal kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan KDH dan WKDH					
<b>BAGIAN RENKEU</b>						
	Belum optimalnya pengelolaan retribusi		<i>tercapainya peningkatan pendapatan yang optimal sesuai potensi perekonomian</i>	<i>peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan BMD</i>	<i>peningkatan pendapatan retribusi</i>	<i>optimalisasi kualitas perencanaan, pendapatan retribusi, penyusunan administrasi BMD dan keuangan</i>
	Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah		<i>tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMD lebih efisien efektif, akuntabel dan transparan</i>	<i>Peningkatkan perencanaan dan administrasi keuangan</i>	<i>Peningkatkan perencanaan dan administrasi keuangan</i>	
	Belum optimalnya inventarisasi aset dan tindak lanjut atas temuan sekretariat daerah, karena keterbatasan informasi atas dokumen dan keberadaan aset					
	Belum Maksimalnya koordinasi antar bagian sekretariat dalam keterlibatan proses perencanaan karena keterbatasan waktu koordinasi karena kesibukan kegiatan tupoksi masing-masing bagian					



## **2.9. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

### **2.9.1 TANTANGAN**

Berdasarkan Fakta diatas Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Tuntutan profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan.
3. Tuntutan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata aturan kewilayahan.
4. Tuntutan dalam meningkatkan dan menata kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Tuntutan dalam peningkatan efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan yang ramping struktur kaya fungsi, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta akuntabilitas kinerja
6. Tuntutan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
7. Tuntutan dalam peningkatan pengendalian administrasi pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Tuntutan dalam peningkatan harmonisasi intern dan antar umat beragama.
9. Tuntutan dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah dan BUMD

### **2.9.2 PELUANG**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi



2. Penerapan kemajuan teknologi informasi pada tatanan manajemen dan dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah
3. Peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam mewujudkan tujuan salah satunya adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkayang sehingga memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian.
6. Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religious dengan penduduk yang ramah tamah memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi menyusun rancangan, mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan daerah yang meliputi urusan keagamaan, sosial, kemasyarakatan.
7. Hubungan kerjasama antara Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten/Kota lain menjadi pendorong bagi Kabupaten Bengkayang dan aparatur untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi yang ada.
8. Adanya pertumbuhan pada sektor perbankan yang dapat meningkatkan pendanaan pada investasi UMKM dan ekonomi kerakyatan sehingga memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan daerah pada sektor pembinaan dan pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bengkayang.



## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang ingin dicapai dalam jangka menengah, yakni selama periode lima tahun perencanaan. Tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam memastikan visi Kabupaten Bengkulu Tengah Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan dan misi Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

#### 3.1.1 Tujuan

Adapun tujuan Sekretariat Daerah Tujuan adalah rumusan umum mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang mencerminkan arah strategis dan fokus kinerja Sekretariat Daerah. Tujuan ini berorientasi pada pencapaian hasil yang mendukung visi Kabupaten Bengkulu Tengah Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan, misi Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi organisasi ke dalam rumusan yang lebih operasional dan terukur, sebagai arah pencapaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan disusun berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan 2 (dua) tujuan strategis sebagai berikut:

**Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman, inovatif, dan terintegrasi**



Tujuan ini diarahkan untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta menjawab tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, efisien, dan berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah serta memperkuat koordinasi antarbagian melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Melalui penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan kebijakan berbasis digital, Sekretariat Daerah berupaya menciptakan lingkungan pelayanan publik yang aman, inovatif, dan responsif. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan akan lebih transparan, mudah diakses, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

**Tujuan 2: Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tujuan ini mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah dalam membangun budaya kerja yang terbuka terhadap pengawasan dan pelibatan publik dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh meliputi penguatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja, peningkatan akses terhadap informasi publik, serta pengembangan kanal partisipatif bagi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan semakin dipercaya masyarakat dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan berintegritas.

**3.1.2 Sasaran**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai selama periode lima tahun, yang mengarah pada hasil spesifik dan terukur. Sasaran ini berfungsi sebagai dasar dalam



merumuskan indikator kinerja dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dirumuskan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

**Sasaran 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama**

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsi koordinatif dan administratif guna memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, sasaran ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membina kerukunan umat beragama serta menciptakan iklim kehidupan beragama yang harmonis dan toleran sebagai bagian penting dari stabilitas sosial dan pembangunan daerah.

**Sasaran 2: Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa**

Melalui sasaran ini, Sekretariat Daerah mendorong terciptanya sistem manajemen kinerja yang berorientasi hasil dan mampu menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan secara efektif. Selain itu, peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa menjadi prioritas agar proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan juga menjadi bagian dari strategi pencapaian sasaran ini.

**Sasaran 3: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah**

Sasaran ini mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab kepada publik. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten dalam setiap proses pemerintahan, Sekretariat Daerah berupaya memperkuat



kepercayaan masyarakat serta menjamin penggunaan sumber daya daerah secara efisien dan berintegritas. Kegiatan strategis dalam sasaran ini mencakup peningkatan kualitas pelaporan, penguatan pengawasan internal, serta keterbukaan informasi publik.

**Sasaran 4: Meningkatkan kualitas layanan dan tertib administrasi kepegawaian**

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional, responsif, dan sesuai regulasi, sebagai fondasi bagi terciptanya birokrasi yang efektif dan berdaya saing. Tata kelola kepegawaian yang tertib dan akurat akan mendorong peningkatan produktivitas aparatur dan mendukung tercapainya target pembangunan daerah. Fokus utama sasaran ini mencakup penyempurnaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan kedisiplinan ASN, serta peningkatan kompetensi dan pengembangan karier pegawai.



Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi</b>	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama		Indeks	B (3,22)	B (3,22)	B (3,60)	B (3,70)	B (3,80)	B (3,90)	B (4,01)
			Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD.	Kategori	Sedang (2,60)	Sedang (2,65)	Sedang (2,70)	Sedang (2,75)	Sedang (2,75)	Sedang (2,80)	Sedang (2,85)
			Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan )dan HAM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah	Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	%	88%	88%	90%	90%	90%	95%	95%	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentaserealisasi program pembangunan dan realisasi anggaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik	Angka	Baik (80)	Baik (80)	Baik (85)	Baik (87)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (96)
			Persentase penyelenggaraan ke protokolandan komunikasi pimpinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah		Poin	B (60,78)	B (60,78)	B (64,00)	B (65,00)	B (66,00)	B (68,00)	BB (71,00)
	Indeks reformasi Birokrasi			Angka	BB (70,44)	BB (70,44)	BB (73,00)	BB (74,00)	BB (75,50)	BB (78,30)	A (81,50)
				Angka	B (83,25)	B (83,25)	B (85,00)	B (86,00)	B (87,00)	B (88,00)	BB (89,00)
					%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase efektivitas pencapaian target retribusi	%	55,66%	55,66%	55,70%	55,80%	55,85%	55,90%	56%
		Meningkatkan kualitas layanan dan tertib administrasi kepegawaian	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi (skala 1–100)	Kategori	75	75	80	82	85	88	90
			Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan	%	45%	45%	60%	70%	80%	90%	95%
			Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi	%	40%	40%	60%	70%	80%	90%	100%
			Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi	%	50%	50%	65%	75%	85%	95%	100%



Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu: Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman, inovatif, dan terintegrasi, Tujuan 2: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang digunakan sebagai capaian tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk indikator sasaran menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang digunakan.

### **3.2. Strategi Sekretariat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan operasional yang disusun secara sistematis untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Strategi ini menjadi kerangka acuan dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Strategi per kepala bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

#### **1. Bagian Tata Pemerintahan**

Strategi:

- a. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. Menyusun dan memutakhirkan data kewilayahan serta fasilitasi penyelesaian batas wilayah;
- c. Mengoptimalkan fasilitasi kerja sama antar daerah dan luar negeri.

#### **2. Bagian Hukum**

Strategi:

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah;



- b. Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi hukum berbasis digital;
  - c. Meningkatkan kapasitas SDM hukum melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Strategi:
  - a. Meningkatkan koordinasi program sosial dan keagamaan lintas sektor;
  - b. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan;
  - c. Mengembangkan sistem monitoring evaluasi program kesejahteraan secara partisipatif.
4. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)  
Strategi:
  - a. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah;
  - b. Memfasilitasi pengembangan investasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
  - c. Mengembangkan sistem data dan informasi ekonomi daerah yang terintegrasi.
5. Bagian Administrasi Pembangunan  
Strategi:
  - a. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program pembangunan;
  - b. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan pembangunan;
  - c. Meningkatkan sinergi program antar SKPD melalui fasilitasi pengendalian program.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Strategi:
  - a. Mendorong pelaksanaan pengadaan secara transparan, efisien, dan akuntabel;



- b. Meningkatkan kompetensi SDM pengadaan melalui pelatihan dan sertifikasi;
- c. Mengembangkan sistem informasi pengadaan secara digital dan real-time.

7. Bagian Umum

Strategi:

- a. Meningkatkan efisiensi layanan administrasi perkantoran dan logistik kepala daerah;
- b. Memastikan ketersediaan sarana prasarana kantor yang representatif;
- c. Meningkatkan pengelolaan aset dan pemeliharaan fasilitas kerja.

8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Strategi:

- a. Meningkatkan profesionalisme layanan keprotokolan;
- b. Meningkatkan kualitas publikasi dan informasi kegiatan kepala daerah;
- c. Mengembangkan kanal komunikasi publik yang inklusif dan berbasis digital.

9. Bagian Organisasi

Strategi:

- a. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata laksana kelembagaan;
- b. Mendorong evaluasi kelembagaan berbasis kinerja dan kebutuhan daerah;
- c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan inovasi birokrasi.

10. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Strategi:

- a. Meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- b. Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;



- c. Memperkuat sistem pelaporan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel.

### **3.3. Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (*Renstra*) Sekretariat Daerah merupakan rumusan umum mengenai pendekatan dan prioritas kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif, serta menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, penerapan good governance dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan teknologi, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat;



3. Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, memperkuat penyelesaian permasalahan hukum melalui pendampingan dan bantuan hukum, serta mengoptimalkan analisis dan evaluasi regulasi untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas kebijakan daerah;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah, sambil menjaga kestabilan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan penguatan sektor ekonomi local;
5. Menyusun program kerja berbasis elektronik sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan dampak lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi;
6. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement), peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi proses pengadaan;
7. Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi aparatur secara profesional dan berbasis digital melalui penguatan sistem informasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, digitalisasi arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas;
8. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kWelembagaan, mendorong budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan penilaian



pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat;

9. Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, responsif, dan terintegrasi guna mendukung efektivitas koordinasi pimpinan daerah serta memperkuat diseminasi informasi kebijakan pemerintah secara tepat dan strategis;
10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pendapatan daerah khususnya retribusi daerah, serta penataan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi dan peningkatan kapasitas SDM.



Tabel 3.3  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
1	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berbasis reformasi birokrasi dan teknologi informasi melalui penerapan standar pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), standar kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi manajemen pemerintahan, serta prosedur pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, penerapan good governance dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.
2	Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial-keagamaan yang transparan dan akuntabel melalui sistem pendataan, verifikasi, dan penilaian kebutuhan masyarakat yang berbasis teknologi informasi, didukung oleh standar kriteria penerima, prosedur administrasi yang baku, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi	Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan teknologi, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat	Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan keagamaan melalui pengelolaan bantuan sosial dan hibah yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis kebutuhan masyarakat, dengan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran



NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
3	Penyelenggaraan fungsi pembentukan dan penanganan produk hukum daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian dan keadilan hukum (norma), melalui penerapan standar perencanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan nasional, dengan prosedur penyusunan, pendokumentasian, pendampingan hukum, dan evaluasi regulasi yang sistematis dan berbasis data, serta kriteria keterpaduan dengan peraturan lebih tinggi, kemanfaatan, implementabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah.	Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, memperkuat penyelesaian permasalahan hukum melalui pendampingan dan bantuan hukum, serta mengoptimalkan analisis dan evaluasi regulasi untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas kebijakan daerah.	Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang harmonis, implementatif, dan responsif serta memperkuat penyelesaian permasalahan hukum melalui perencanaan legislasi yang terarah, pendampingan hukum, dan evaluasi regulasi yang berkelanjutan
4	Pengelolaan ekonomi daerah dilakukan melalui penerapan norma pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Norma), dengan standar pengembangan sektor unggulan daerah, kebijakan fiskal yang stabil, serta strategi pengendalian inflasi yang terukur, dan prosedur yang melibatkan koordinasi antar sektor serta pengawasan regulasi ekonomi, serta kriteria pengukuran daya saing daerah, tingkat inflasi, dan kontribusi sektor ekonomi terhadap pendapatan daerah yang berbasis pada indikator ekonomi makro dan mikro	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah, sambil menjaga kestabilan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan penguatan sektor ekonomi lokal.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat sektor-sektor unggulan, mendorong investasi, serta menjaga stabilitas harga dan inflasi melalui kebijakan fiskal yang efektif dan pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat



NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
5	<p>Penyusunan program kerja berbasis elektronik dilakukan dengan mengacu pada norma tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Standar penyusunan program mencakup pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengawasan, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan prosedur yang memastikan setiap program dan kebijakan yang disusun mempertimbangkan dampak lingkungan. Kriteria keberhasilan mencakup terintegrasinya data dan sistem elektronik dalam program kerja, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan evaluasi dampak lingkungan dalam setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan</p>	<p>Menyusun program kerja berbasis elektronik sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan dampak lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi</p>	<p>Menyusun program kerja yang efektif dan efisien berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan, serta berbasis teknologi informasi dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.</p>
6	<p>Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan mengacu pada norma akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi anggaran. Standar prosedur pengadaan mengedepankan prinsip-prinsip hukum pengadaan barang/jasa yang berlaku, serta penggunaan sistem elektronik yang memfasilitasi proses tender dan monitoring. Prosedur pengadaan dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, dengan kontrol internal yang ketat dan partisipasi publik untuk menjamin transparansi. Kriteria keberhasilan meliputi tercapainya pengadaan yang tepat waktu, sesuai kualitas, harga wajar, dan pengelolaan yang sesuai anggaran serta prinsip good governance</p>	<p>Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement), peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi proses pengadaan.</p>	<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan melalui penguatan sistem pengadaan barang/jasa yang akuntabel, berorientasi pada kinerja, serta didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi.</p>



NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
7	Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berintegritas melalui penguatan sistem kepegawaian berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan efektivitas administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi aparatur secara profesional dan berbasis digital melalui penguatan sistem informasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, digitalisasi arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.
8	Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada norma tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Standar penyelenggaraan pemerintah meliputi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pengukuran kinerja berbasis SAKIP dan penilaian pelayanan publik. Prosedur yang diterapkan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, pelayanan publik, serta pengelolaan dan pemantauan kinerja OPD dengan prinsip transparansi. Kriteria keberhasilan mencakup pencapaian tujuan kinerja OPD yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal dan peningkatan penilaian SAKIP serta pelayanan publik yang lebih responsif.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mendorong budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan penilaian pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara terintegrasi



NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
9	<p>Optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan dilakukan dengan menetapkan norma dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan komunikasi antar pimpinan, serta standar yang mengutamakan efisiensi dan kelancaran. Prosedur tersebut mencakup penggunaan sistem komunikasi yang efektif, baik melalui teknologi maupun koordinasi langsung. Kriteria keberhasilan diukur berdasarkan kelancaran dan efektivitas komunikasi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta keberhasilan pelaksanaan acara dan kegiatan protokoler yang tepat waktu dan sesuai standar</p>	<p>Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, responsif, dan terintegrasi guna mendukung efektivitas koordinasi pimpinan daerah serta memperkuat diseminasi informasi kebijakan pemerintah secara tepat dan strategis.</p>	<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif melalui penguatan kapasitas komunikasi pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta koordinasi yang efektif antar unit kerja pemerintah daerah.</p>
10	<p>Optimalisasi kualitas perencanaan, pendapatan retribusi, penyusunan administrasi BMD dan keuangan dilakukan dengan menggunakan norma dan standar perencanaan yang akurat, transparan, dan berbasis data. Prosedur yang diterapkan mencakup pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang efisien, serta mekanisme pengelolaan BMD yang tepat dan sesuai ketentuan. Kriteria keberhasilan diukur dari kualitas pelaporan keuangan, ketepatan dan efisiensi penggunaan anggaran, serta kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan retribusi secara optimal</p>	<p>Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pendapatan daerah khususnya retribusi daerah, serta penataan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi dan peningkatan kapasitas SDM</p>	<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel melalui penguatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan aset daerah yang transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi.</p>



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif, mengelola program, kegiatan sub kegiatan dan kinerja yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara umum.

Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **4.1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini berfokus pada penataan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan administrasi pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan penguatan sistem hukum daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan:

- 1) **Administrasi Tata Pemerintahan:** Meliputi penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat:** Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat, peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga dan kelompok masyarakat, serta peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan;
- 3) **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum:** Termasuk penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi bantuan hukum, pendokumentasian produk hukum, dan pengelolaan informasi hukum.



#### **4.2. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini bertujuan mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan kebijakan perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian ekonomi mikro kecil, fasilitasi dan pengawasan program pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, energi, dan lingkungan hidup. Program ini fokus pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian: Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, serta pengendalian dan distribusi perekonomian;
- 2) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil: Pengembangan dan pengawasan sektor ekonomi mikro dan kecil di daerah;
- 3) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan: Fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 5) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam: Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, dan air.

#### **4.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini meliputi kegiatan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Program ini mencakup berbagai kegiatan administratif dan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:



1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Meliputi penyusunan dokumen perencanaan, RKA-SKPD, DPA-SKPD, laporan capaian kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan;
3. Administrasi Barang Milik Daerah: Meliputi perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, rekonsiliasi, dan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
4. Administrasi Pendapatan Daerah: Fokus pada perencanaan dan pelaporan pengelolaan retribusi daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Termasuk pengadaan pakaian dinas, pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, serta koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah: Meliputi penyediaan komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
7. Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Termasuk pengadaan kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor;
8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah: Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretariat daerah;
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah: Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretariat daerah;
10. Penataan Organisasi dan Pengelolaan Kelembagaan: Termasuk analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik, tata laksana, serta monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik;
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan: Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas pimpinan.



**Tabel 4.3  
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR/OUTCOME/OUT PUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				Rp 47.621.682.036		Rp59.134.111.5 51		Rp60.132.043.0 61		Rp 60.354.767.722		Rp 60.997.764.849	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indikator: Nilai AKIP PD	100%	100%	Rp 31.972.230.267	100%	Rp36.117.639.4 51	100%	Rp36.917.639.4 51	100%	Rp 37.087.639.451	100%	Rp 37.672.639.451	
	outcome : Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah												
	Output : Terlaksananya layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, perlengkapan, dan administrasi umum secara tertib, transparan, dan tepat waktu												
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp100.595.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 170.439.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 170.439.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp170.439.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp170.439.000</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp33.365.000	7 Dokumen	Rp 46.482.000	7 Dokumen	Rp 46.482.000	7 Dokumen	Rp46.482.000	7 Dokumen	Rp46.482.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp11.000.000	1 Dokumen	Rp 16.479.000	1 Dokumen	Rp 16.479.000	1 Dokumen	Rp16.479.000	1 Dokumen	Rp16.479.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 9.500.000	2 Dokumen	Rp 23.260.000	2 Dokumen	Rp 23.260.000	2 Dokumen	Rp23.260.000	2 Dokumen	Rp23.260.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp11.000.000	1 Dokumen	Rp 16.849.000	1 Dokumen	Rp 16.849.000	1 Dokumen	Rp16.849.000	1 Dokumen	Rp16.849.000	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp11.000.000	2 Dokumen	Rp 17.348.000	2 Dokumen	Rp 17.348.000	2 Dokumen	Rp17.348.000	2 Dokumen	Rp17.348.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Rp11.000.000	4 Laporan	Rp 20.349.000	4 Laporan	Rp 20.349.000	4 Laporan	Rp20.349.000	4 Laporan	Rp20.349.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Rp13.730.000	5 Laporan	Rp 29.672.000	5 Laporan	Rp 29.672.000	5 Laporan	Rp29.672.000	5 Laporan	Rp29.672.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 15.834.020.730</b>	<b>100%</b>	<b>Rp13.366.300.276</b>	<b>100%</b>	<b>Rp13.366.300.276</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 13.366.300.276</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 13.366.300.276</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1344 orang/bulan	1344 orang/bulan	Rp 15.751.525.730	1344 orang/bulan	Rp13.187.427.276	1344 orang/bulan	Rp13.187.427.276	1344 orang/bulan	Rp13.187.427.276	1344 orang/bulan	Rp13.187.427.276	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	Rp42.400.000	200 Dokumen	Rp 104.691.000	200 Dokumen	Rp 104.691.000	200 Dokumen	Rp104.691.000	200 Dokumen	Rp104.691.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp10.332.000	1 Laporan	Rp 22.065.000	1 Laporan	Rp 22.065.000	1 Laporan	Rp22.065.000	1 Laporan	Rp22.065.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp11.000.000	10 Dokumen	Rp 18.691.000	10 Dokumen	Rp 18.691.000	10 Dokumen	Rp18.691.000	10 Dokumen	Rp18.691.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp11.704.000	12 Dokumen	Rp 16.960.000	12 Dokumen	Rp 16.960.000	12 Dokumen	Rp16.960.000	12 Dokumen	Rp16.960.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 7.059.000	2 Dokumen	Rp 16.466.000	2 Dokumen	Rp 16.466.000	2 Dokumen	Rp16.466.000	2 Dokumen	Rp16.466.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp364.473.850</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 457.459.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 477.459.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp497.459.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp517.459.000</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp11.000.000	5 Dokumen	Rp 19.478.000	5 Dokumen	Rp 19.478.000	5 Dokumen	Rp19.478.000	5 Dokumen	Rp19.478.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp191.878.850	1 Dokumen	Rp 210.000.000	1 Dokumen	Rp 230.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp270.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Rp11.000.000	2 Laporan	Rp 10.478.000	2 Laporan	Rp 10.478.000	2 Laporan	Rp10.478.000	2 Laporan	Rp10.478.000	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp11.000.000	5 Dokumen	Rp 10.478.000	5 Dokumen	Rp 10.478.000	5 Dokumen	Rp10.478.000	5 Dokumen	Rp10.478.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp139.595.000	5 Dokumen	Rp 207.025.000	5 Dokumen	Rp 207.025.000	5 Dokumen	Rp207.025.000	5 Dokumen	Rp207.025.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>55,66%</b>	<b>55,70%</b>	<b>Rp -</b>	<b>55,80%</b>	<b>Rp 29.000.000</b>	<b>55,85%</b>	<b>Rp 29.000.000</b>	<b>55,90%</b>	<b>Rp29.000.000</b>	<b>56%</b>	<b>Rp29.000.000</b>
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	Rp -	2 Dokumen	Rp 19.000.000	2 Dokumen	Rp 19.000.000	2 Dokumen	Rp19.000.000	2 Dokumen	Rp19.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp10.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Kepuasan Layanan Administrasi (skala 1-100)</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>Rp196.740.000</b>	<b>82</b>	<b>Rp 382.161.000</b>	<b>85</b>	<b>Rp 397.161.000</b>	<b>88</b>	<b>Rp412.161.000</b>	<b>90</b>	<b>Rp427.161.000</b>
	<b>Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan</b>	<b>-</b>	<b>60%</b>		<b>70%</b>		<b>80%</b>		<b>90%</b>		<b>95%</b>	
	<b>Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi</b>	<b>-</b>	<b>60%</b>		<b>70%</b>		<b>80%</b>		<b>90%</b>		<b>100%</b>	
	<b>Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi</b>		<b>65%</b>		<b>75%</b>		<b>85%</b>		<b>95%</b>		<b>100%</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Rp40.000.000	1 Paket	Rp 250.000.000	1 Paket	Rp 250.000.000	1 Paket	Rp250.000.000	1 Paket	Rp250.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp 43.691.000	1 Dokumen	Rp 48.691.000	1 Dokumen	Rp53.691.000	1 Dokumen	Rp58.691.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp 17.191.000	1 Dokumen	Rp 22.191.000	1 Dokumen	Rp27.191.000	1 Dokumen	Rp32.191.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Pegawai	25 Pegawai	Rp136.740.000	25 Pegawai	Rp 71.279.000	25 Pegawai	Rp 76.279.000	25 Pegawai	Rp81.279.000	25 Pegawai	Rp86.279.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 3.356.290.476</b>	<b>100%</b>	<b>Rp3.171.200.500</b>	<b>100%</b>	<b>Rp3.291.200.500</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 3.431.200.500</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 3.571.200.500</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp 147.928.000	1 Paket	Rp 152.928.000	1 Paket	Rp157.928.000	1 Paket	Rp162.928.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp274.881.510	1 Paket	Rp 118.342.000	1 Paket	Rp 123.342.000	1 Paket	Rp128.342.000	1 Paket	Rp133.342.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp 250.000.000	1 Paket	Rp 265.000.000	1 Paket	Rp280.000.000	1 Paket	Rp295.000.000



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp272.578.866	1 Paket	Rp 374.372.500	1 Paket	Rp 399.372.500	1 Paket	Rp424.372.500	1 Paket	Rp449.372.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp50.000.000	1 Paket	Rp 77.120.000	1 Paket	Rp 82.120.000	1 Paket	Rp87.120.000	1 Paket	Rp92.120.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp20.000.000	1 Dokumen	Rp 9.780.000	1 Dokumen	Rp 9.780.000	1 Dokumen	Rp9.780.000	1 Dokumen	Rp9.780.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30 Paket	Rp144.221.100	32 Paket	Rp 200.000.000	34 Paket	Rp 220.000.000	36 Paket	Rp260.000.000	38 Paket	Rp300.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket	1 Paket	Rp760.820.000	1 Paket	Rp 562.310.000	1 Paket	Rp 587.310.000	1 Paket	Rp612.310.000	1 Paket	Rp637.310.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	Rp 1.545.789.000	150 Laporan	Rp1.332.870.000	150 Laporan	Rp1.342.870.000	150 Laporan	Rp 1.352.870.000	150 Laporan	Rp 1.362.870.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp 15.478.000	1 Dokumen	Rp 20.478.000	1 Dokumen	Rp25.478.000	1 Dokumen	Rp30.478.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp78.000.000	1 Dokumen	Rp 83.000.000	1 Dokumen	Rp 88.000.000	1 Dokumen	Rp93.000.000	1 Dokumen	Rp98.000.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.227.990.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp3.150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp3.300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.900.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 3.100.000.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit	Rp950.000.000	-	Rp -	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		Rp -	1 Unit	Rp 900.000.000	1 Unit	Rp 900.000.000	1 Unit	Rp 1.000.000.000	1 Unit	Rp 1.000.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	400 Unit	Rp40.000.000	450 Unit	Rp 500.000.000	500 Unit	Rp 550.000.000	550 Unit	Rp600.000.000	600 Unit	Rp800.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	Rp119.590.000	7 Unit	Rp 350.000.000	7 Unit	Rp 350.000.000	8 Unit	Rp400.000.000	8 Unit	Rp400.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		200 Unit	Rp118.400.000	130 Unit	Rp1.400.000.000	140 Unit	Rp1.500.000.000	120 Unit	Rp900.000.000	120 Unit	Rp900.000.000	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.553.634.843</b>	<b>100%</b>	<b>Rp7.803.945.050</b>	<b>100%</b>	<b>Rp8.043.945.050</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 8.183.945.050</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 8.223.945.050</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan	Rp 7.000.000	1000 Laporan	Rp 12.962.000	1000 Laporan	Rp 17.962.000	1000 Laporan	Rp22.962.000	1000 Laporan	Rp27.962.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	Rp 1.403.451.742	12 Laporan	Rp1.165.138.314	12 Laporan	Rp1.195.138.314	12 Laporan	Rp 1.225.138.314	12 Laporan	Rp 1.255.138.314	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15 Laporan	Rp703.075.936	19 Laporan	Rp1.300.000.000	19 Laporan	Rp1.500.000.000	19 Laporan	Rp 1.600.000.000	20 Laporan	Rp 1.600.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 3.440.107.165	1 Laporan	Rp5.325.844.736	1 Laporan	Rp5.330.844.736	1 Laporan	Rp 5.335.844.736	1 Laporan	Rp 5.340.844.736	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.896.866.150</b>	<b>100%</b>	<b>Rp4.320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp4.370.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 4.420.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 4.470.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	55 Unit	Rp 1.060.461.250	55 Unit	Rp2.000.000.000	55 Unit	Rp2.000.000.000	55 Unit	Rp 2.000.000.000	55 Unit	Rp 2.000.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	45 Unit	Rp120.000.000	48 Unit	Rp 120.000.000	48 Unit	Rp 120.000.000	48 Unit	Rp120.000.000	48 Unit	Rp120.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	100 Unit	Rp 5.100.000	100 Unit	Rp 100.000.000	100 Unit	Rp 100.000.000	100 Unit	Rp100.000.000	100 Unit	Rp100.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	300 Unit	Rp496.500.000	300 Unit	Rp 700.000.000	300 Unit	Rp 700.000.000	300 Unit	Rp700.000.000	300 Unit	Rp700.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	200 Unit	Rp200.000.000	250 Unit	Rp1.200.000.000	250 Unit	Rp1.200.000.000	250 Unit	Rp 1.200.000.000	250 Unit	Rp 1.200.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	Rp14.804.900	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 250.000.000	1 Unit	Rp300.000.000	1 Unit	Rp350.000.000	
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp896.220.778</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 749.021.625</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 904.021.625</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.059.021.625</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.079.021.625</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 orang/bulan	28 orang/bulan	Rp350.020.778	28 orang/bulan	Rp 174.021.625	28 orang/bulan	Rp 174.021.625	28 orang/bulan	Rp174.021.625	28 orang/bulan	Rp174.021.625	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Rp115.200.000	5 Paket	Rp 130.000.000	5 Paket	Rp 280.000.000	5 Paket	Rp430.000.000	5 Paket	Rp445.000.000	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	Rp31.000.000	2 orang/bulan	Rp 45.000.000	2 orang/bulan	Rp 50.000.000	2 orang/bulan	Rp55.000.000	2 orang/bulan	Rp60.000.000	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang/bulan	24 orang/bulan	Rp400.000.000	24 orang/bulan	Rp 400.000.000	24 orang/bulan	Rp 400.000.000	24 orang/bulan	Rp400.000.000	24 orang/bulan	Rp400.000.000	
<b>Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah</b>	<b>persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.268.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.170.476.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.170.476.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.170.476.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.170.476.000</b>	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp561.600.000	1 Paket	Rp 561.600.000	1 Paket	Rp 561.600.000	1 Paket	Rp561.600.000	1 Paket	Rp561.600.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp441.600.000	1 Paket	Rp 381.600.000	1 Paket	Rp 381.600.000	1 Paket	Rp381.600.000	1 Paket	Rp381.600.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp265.000.000	1 Paket	Rp 227.276.000	1 Paket	Rp 227.276.000	1 Paket	Rp227.276.000	1 Paket	Rp227.276.000	
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>B (83,25)</b>	<b>B (85,00)</b>	<b>Rp508.295.240</b>	<b>B (86,00)</b>	<b>Rp 447.637.000</b>	<b>B (87,00)</b>	<b>Rp 447.637.000</b>	<b>B (88,00)</b>	<b>Rp447.637.000</b>	<b>BB (89,00)</b>	<b>Rp447.637.000</b>	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	43 Dokumen	43 Dokumen	Rp157.289.160	43 Dokumen	Rp 131.771.000	43 Dokumen	Rp 131.771.000	43 Dokumen	Rp131.771.000	43 Dokumen	Rp131.771.000	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 Laporan	20 Laporan	Rp99.557.600	20 Laporan	Rp 85.815.000	20 Laporan	Rp 85.815.000	20 Laporan	Rp85.815.000	20 Laporan	Rp85.815.000	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp108.505.240	3 Dokumen	Rp 90.952.000	3 Dokumen	Rp 90.952.000	3 Dokumen	Rp90.952.000	3 Dokumen	Rp90.952.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp53.991.600	1 Dokumen	Rp 65.269.000	1 Dokumen	Rp 65.269.000	1 Dokumen	Rp65.269.000	1 Dokumen	Rp65.269.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp88.951.640	12 Dokumen	Rp 73.830.000	12 Dokumen	Rp 73.830.000	12 Dokumen	Rp73.830.000	12 Dokumen	Rp73.830.000	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan ke protokolandan komunikasi pimpinan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp768.903.200</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 900.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 950.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.100.000.000</b>	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	20 Laporan	20 Laporan	Rp185.187.600	20 Laporan	Rp 250.000.000	20 Laporan	Rp 250.000.000	20 Laporan	Rp300.000.000	20 Laporan	Rp350.000.000	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	20 Laporan	20 Laporan	Rp222.065.600	20 Laporan	Rp 200.000.000	20 Laporan	Rp 200.000.000	20 Laporan	Rp200.000.000	20 Laporan	Rp250.000.000	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	20 Laporan	20 Laporan	Rp361.650.000	20 Laporan	Rp 450.000.000	20 Laporan	Rp 500.000.000	20 Laporan	Rp500.000.000	20 Laporan	Rp500.000.000	
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Indikator : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 14.585.884.902</b>	<b>100%</b>	<b>Rp21.753.084.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp21.903.084.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 21.903.084.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 21.903.084.000</b>	
	<b>outcome : Meningkatnya kualitas kebijakanesejahteraan rakyat</b>	-	100%		100%		100%		100%		100%		
	<b>output: Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan umum serta pembinaan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan kebudayaan</b>	-	100%		100%		100%		100%		100%		
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Nilai LPPD, ILPPD, ELPPD.</b>	<b>Sedang (2,60)</b>	<b>Sedang (2,65)</b>	<b>Rp 1.894.451.630</b>	<b>Sedang (2,70)</b>	<b>Rp1.255.102.000</b>	<b>Sedang (2,75)</b>	<b>Rp1.255.102.000</b>	<b>Sedang (2,80)</b>	<b>Rp 1.255.102.000</b>	<b>Sedang (2,85)</b>	<b>Rp 1.255.102.000</b>	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp908.271.030	4 Dokumen	Rp 577.860.000	4 Dokumen	Rp 577.860.000	4 Dokumen	Rp577.860.000	4 Dokumen	Rp577.860.000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp544.962.600	1 Dokumen	Rp 75.200.000	1 Dokumen	Rp 75.200.000	1 Dokumen	Rp75.200.000	1 Dokumen	Rp75.200.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp441.218.000	7 Dokumen	Rp 402.042.000	7 Dokumen	Rp 402.042.000	7 Dokumen	Rp402.042.000	7 Dokumen	Rp402.042.000	
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	Rp -	43 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	43 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	43 Perangkat Daerah	Rp100.000.000	43 Perangkat Daerah	Rp100.000.000	
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	Rp -	43 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	43 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	43 Perangkat Daerah	Rp100.000.000	43 Perangkat Daerah	Rp100.000.000	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	100%	100%	Rp 11.996.162.772	100%	Rp19.697.982.000	100%	Rp19.697.982.000	100%	Rp 19.697.982.000	100%	Rp 19.697.982.000
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 11.785.022.772	10 Dokumen	Rp19.347.233.000	10 Dokumen	Rp19.347.233.000	10 Dokumen	Rp19.347.233.000	10 Dokumen	Rp19.347.233.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp105.570.000	1 Dokumen	Rp 100.749.000	1 Dokumen	Rp 100.749.000	1 Dokumen	Rp100.749.000	1 Dokumen	Rp100.749.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp105.570.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	Rp -	500 keluarga	Rp 100.000.000	500 Keluarga	Rp 100.000.000	500 Keluarga	Rp100.000.000	500 Keluarga	Rp100.000.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	Rp -	500 keluarga	Rp 100.000.000	500 keluarga	Rp 100.000.000	500 keluarga	Rp100.000.000	500 keluarga	Rp100.000.000
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase produk hukum yang dihasilkan</b>	-	100%	<b>Rp695.270.500</b>	100%	<b>Rp 800.000.000</b>	100%	<b>Rp 950.000.000</b>	100%	<b>Rp950.000.000</b>	100%	<b>Rp950.000.000</b>



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum</b>	-	100%		100%		100%		100%		100%	
	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan HAM</b>	-	100%		100%		100%		100%		100%	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	564 Dokumen	564 Dokumen	Rp248.088.700	564 Dokumen	Rp250.000.000	564 Dokumen	Rp300.000.000	564 Dokumen	Rp300.000.000	564 Dokumen	Rp300.000.000
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	4 Kasus	4 Kasus	Rp297.453.200	4 Kasus	Rp350.000.000	4 Kasus	Rp400.000.000	4 Kasus	Rp400.000.000	4 Kasus	Rp400.000.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	15 Dokumen	15 Dokumen	Rp149.728.600	15 Dokumen	Rp200.000.000	15 Dokumen	Rp250.000.000	15 Dokumen	Rp250.000.000	15 Dokumen	Rp250.000.000
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Indikator: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.063.566.867</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.263.388.100</b>	<b>100%</b>	<b>Rp1.311.319.610</b>	<b>95%</b>	<b>Rp 1.364.044.271</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.422.041.398</b>
	outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	-	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
	output: Terlaksananya fasilitas, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi, infrastruktur, sumber daya alam, dan pengadaan barang/jasa	-	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Persentase Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	100%	100%	<b>Rp224.297.867</b>	100%	<b>Rp 123.278.000</b>	100%	<b>Rp 123.278.000</b>	100%	<b>Rp123.278.000</b>	100%	<b>Rp123.278.000</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp125.143.200	1 Dokumen	Rp 56.708.000	1 Dokumen	Rp 56.708.000	1 Dokumen	Rp56.708.000	1 Dokumen	Rp56.708.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	Rp54.612.345	5 Laporan	Rp 33.285.000	5 Laporan	Rp 33.285.000	5 Laporan	Rp33.285.000	5 Laporan	Rp33.285.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp44.542.322	1 Dokumen	Rp 33.285.000	1 Dokumen	Rp 33.285.000	1 Dokumen	Rp33.285.000	1 Dokumen	Rp33.285.000
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Persentase kualitas realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran	100%	100%	<b>Rp150.636.000</b>	100%	<b>Rp 128.955.000</b>	100%	<b>Rp 128.955.000</b>	100%	<b>Rp128.955.000</b>	100%	<b>Rp128.955.000</b>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp47.500.000	10 Dokumen	Rp 49.263.000	10 Dokumen	Rp 49.263.000	10 Dokumen	Rp49.263.000	10 Dokumen	Rp49.263.000



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029**

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	Rp47.500.000	1 Laporan	Rp 36.079.000	1 Laporan	Rp 36.079.000	1 Laporan	Rp36.079.000	1 Laporan	Rp36.079.000	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	Rp55.636.000	1 Laporan	Rp 43.613.000	1 Laporan	Rp 43.613.000	1 Laporan	Rp43.613.000	1 Laporan	Rp43.613.000	
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik</b>	<b>Baik (80)</b>	<b>Baik (85)</b>	<b>Rp435.741.000</b>	<b>Baik (87)</b>	<b>Rp 479.315.100</b>	<b>Sangat Baik (90)</b>	<b>Rp 527.246.610</b>	<b>Sangat Baik (92)</b>	<b>Rp579.971.271</b>	<b>Sangat Baik (96)</b>	<b>Rp637.968.398</b>	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp223.621.000	12 Dokumen	Rp245.983.100	12 Dokumen	Rp270.581.410	12 Dokumen	Rp297.639.551	12 Dokumen	Rp327.403.506	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp99.120.000	1 Dokumen	Rp109.032.000	1 Dokumen	Rp119.935.200	1 Dokumen	Rp131.928.720	1 Dokumen	Rp145.121.592	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	350 Orang	Rp113.000.000	400 Orang	Rp124.300.000	450 Orang	Rp136.730.000	500 Orang	Rp150.403.000	550 Orang	Rp165.443.300	
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR</b>	<b>88%</b>	<b>90%</b>	<b>Rp252.892.000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 531.840.000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 531.840.000</b>	<b>95%</b>	<b>Rp531.840.000</b>	<b>95%</b>	<b>Rp531.840.000</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp95.730.000	1 Dokumen	Rp 418.424.000	1 Dokumen	Rp 418.424.000	1 Dokumen	Rp418.424.000	1 Dokumen	Rp418.424.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp78.581.000	1 Dokumen	Rp 56.708.000	1 Dokumen	Rp 56.708.000	1 Dokumen	Rp56.708.000	1 Dokumen	Rp56.708.000	



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp78.581.000	1 Dokumen	Rp 56.708.000	1 Dokumen	Rp 56.708.000	1 Dokumen	Rp56.708.000	1 Dokumen	Rp56.708.000	
--	---	-----------	-----------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--



#### **4.4. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan Sekretariat Daerah**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama;
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses;
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan /penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. Efektif, data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)



Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan langkah –langkah sebagai berikut :

- a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah);
- b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- c. Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

#### **4.5. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Utama disusun secara sistematis dan terukur untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Daerah, dalam rangka memastikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penentuan target keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang



Tahun 2025-20229 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) yang juga memiliki keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Berikut initalabel indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029:



Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai LPPD, /ILPPD, /ELPPD.	Kategori	Sedang (2,60)	Sedang (2,65)	Sedang (2,70)	Sedang (2,75)	Sedang (2,75)	Sedang (2,80)	Sedang (2,85)
Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan ) dan HAM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	%	88%	88%	90%	90%	90%	95%	95%
Persentase Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentaserealisasi program pembangunan dan realisasi anggaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik	Angka	Baik (80)	Baik (80)	Baik (85)	Baik (87)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (96)
Persentase penyelenggaraan ke protokolandan komunikasi pimpinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	B (83,25)	B (83,25)	B (85,00)	B (86,00)	B (87,00)	B (88,00)	BB (89,00)
persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase efektivitas pencapaian target retribusi	%	55,66%	55,66%	55,70%	55,80%	55,85%	55,90%	56%
Nilai Kepuasan Layanan Administrasi (skala 1–100)	Kategori	75	75	80	82	85	88	90
Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan	%	45%	45%	60%	70%	80%	90%	95%
Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi	%	40%	40%	60%	70%	80%	90%	100%
Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi	%	50%	50%	65%	75%	85%	95%	100%



Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang menetapkan sejumlah indikator sasaran strategis dengan target terukur secara tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030. Indikator-indikator ini mencerminkan fokus pembangunan kelembagaan, pelayanan publik, hukum, komunikasi, kepegawaian, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Salah satu indikator utama adalah Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD, yang merupakan tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2024, nilai tersebut berada pada kategori Sedang (2,60) dan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai Sedang (2,85) pada tahun 2030, sebagai wujud dari perbaikan sistem, pelaksanaan program, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Komitmen penuh terhadap pelayanan publik ditunjukkan dengan target 100% capaian untuk beberapa indikator penting seperti pembinaan dan pelayanan keagamaan, penyusunan produk hukum daerah, penyelesaian permasalahan hukum, termasuk hukum non-litigasi dan HAM, serta kerja sama dengan dunia usaha dan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Hal ini menandakan bahwa Sekretariat Daerah senantiasa menjamin keberlanjutan layanan dan tata kelola yang profesional.

Indikator Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR menunjukkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah, dengan peningkatan dari 88% pada tahun 2024 menjadi 95% pada tahun 2030, sejalan dengan penguatan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

Dari sisi pengelolaan anggaran dan pengadaan, indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa ditargetkan meningkat dari kategori Baik (80) pada 2024 menjadi Sangat Baik (96) pada tahun 2030. Hal ini menjadi indikator penting dalam memastikan efisiensi dan akuntabilitas belanja publik.

Peningkatan kualitas layanan publik juga tergambar dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang ditargetkan naik dari nilai B (83,25) menjadi BB (89,00) dalam rentang lima tahun. Ini didukung oleh target 100% pada penyelenggaraan administrasi perkantoran dan realisasi anggaran.

Dalam aspek penerimaan daerah, efektivitas pencapaian target retribusi ditargetkan meningkat secara perlahan dari 55,66% pada 2024 menjadi 56% pada 2030, sebagai bentuk upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Untuk meningkatkan kualitas layanan internal, nilai kepuasan layanan administrasi ditargetkan naik dari 75 ke 90, sementara indikator persentase ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan akan ditingkatkan dari 45% menjadi 95% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan upaya penguatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan, ditetapkan target peningkatan layanan kepegawaian yang terdigitalisasi dari 40% menjadi 100%, dan dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi dari 50% menjadi 100% pada akhir tahun 2030. Ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi menuju pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menggambarkan arah strategis Sekretariat Daerah dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, kolaboratif, dan inovatif dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2030.

#### **4.6. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap masyarakat. Indikator Kinerja Kunci disusun untuk masing-masing urusan pemerintahan dan mencerminkan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.

IKK digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan strategis, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Setiap indikator dirancang secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta disertai dengan target tahunan selama periode perencanaan 2025–2029 guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur.



Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indkes Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	BB (70,44)	BB (72,00)	BB (73,00)	BB (74,00)	BB (75,50)	BB (78,30)	A (81,50)
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	B (3,22)	B (3,51)	B (3,60)	B (3,70)	B (3,80)	B (3,90)	B (4,01)
3	Nilai SAKIP	Peringkat	B (60,78)	B (62,00)	B (64,00)	B (65,00)	B (66,00)	B (68,00)	BB (71,00)

Tabel. 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	-	81,30	81,50	81,70	82	82,50	82,70
2	Indeks Kemantangan Organisasi	Kategori	-	Sedang (29,77)	Sedang (29,80)	Sedang (29,80)	Sedang (29,85)	Sedang (29,85)	Sedang (29,90)
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	-	Sedang (2,65)	Sedang (2,70)	Sedang (2,75)	Sedang (2,75)	Sedang (2,80)	Sedang (2,85)



Berdasarkan tabel 4.5 indikator kinerja daerah (IKD) adalah sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Sekretariat Daerah menetapkan tiga indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Pelayanan Publik (IPP), dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**

Pada tahun 2024, nilai IRB berada pada kategori BB dengan skor 70,44. Target capaian IRB ditetapkan meningkat secara bertahap setiap tahun, mencerminkan penguatan reformasi birokrasi yang meliputi aspek manajemen perubahan, penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Target IRB adalah mencapai skor 81,50 dengan kategori A pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Bengkayang menargetkan pencapaian birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)**

Nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 adalah 3,22 dengan kategori B. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara konsisten, dengan capaian target IPP sebesar 4,01 pada tahun 2030. Kenaikan indeks ini diharapkan terjadi seiring dengan peningkatan standar pelayanan minimum, digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

### **3. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**

Pada tahun 2024, nilai IRB berada pada kategori BB dengan skor 70,44. Target capaian IRB ditetapkan meningkat secara bertahap setiap tahun, mencerminkan penguatan reformasi birokrasi yang meliputi aspek manajemen perubahan, penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Target IRB adalah mencapai skor 81,50 dengan kategori A pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Bengkayang menargetkan pencapaian birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Berdasarkan tabel. 4.6 indikator kinerja kunci (IKK) dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Sekretariat Daerah menetapkan beberapa indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja kelembagaan dan kepatuhan terhadap norma serta standar pelayanan yang berlaku. Indikator tersebut meliputi Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Kemantapan Organisasi, dan Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

### **1. Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik**

Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan standar pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun belum terdapat baseline pada tahun 2024, pada tahun 2025 ditargetkan mencapai nilai 81,30, dengan tren peningkatan secara bertahap hingga mencapai 82,70 pada tahun 2030. Target ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

### **2. Indeks Kemantapan Organisasi**

Indeks ini mengukur kapasitas dan kematangan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Walaupun belum tersedia data awal tahun 2024, Pemerintah Daerah menetapkan nilai awal Sedang (29,77) pada tahun 2025 dengan target peningkatan bertahap menjadi Sedang (29,90) pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam menata struktur organisasi, memperbaiki proses bisnis internal, dan menguatkan tata kelola kelembagaan agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

### **3. Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)**

Nilai LPPD merupakan ukuran kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan wajib berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pada tahun 2025 ditargetkan mencapai kategori Sedang dengan nilai 2,65, meningkat secara bertahap menjadi 2,85 pada tahun 2030. Peningkatan nilai LPPD mencerminkan upaya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta pelaporan kinerja yang semakin akuntabel dan sesuai dengan standar penilaian nasional.



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan. Renstra ini mengacu pada misi pembangunan daerah, khususnya misi ke-2 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel”, serta tujuan “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas”. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai panduan bersama untuk menjalankan tugas dan pelayanan publik dengan lebih baik. Kami menyadari bahwa tantangan ke depan tidak mudah, tapi dengan kerja sama dan semangat tinggi dari seluruh jajaran, serta dukungan masyarakat, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

Mari kita jadikan Renstra ini sebagai komitmen bersama untuk terus berinovasi, berkoordinasi, dan memberikan yang terbaik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak seluruh jajaran Sekretariat Daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan Renstra ini dengan penuh komitmen, disiplin, dan inovasi. Kolaborasi yang erat dengan seluruh perangkat daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan kuat dalam mengawal perubahan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang menuju masa depan yang lebih baik.

Bengkayang, 23 Mei 2025

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bengkayang



**YUSTIANUS, S.E., M.M**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19691116 200003 1 004